

**POLA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN MELALUI
PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN
TEKNOLOGI INDUSTRI OLEH DIKRANADASDA DI
TINJUAN MENURUT EKONOMI ISLAM
(Studi Kasus di Kabupaten Aceh Utara)**



OLEH:

MALAHAYATIE,S.HI,MA

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
LHOKSEUMAWE**

2017

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	
KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Kajian Pustaka	9
F. Definisi Operasional	11
G. Sistematika Penulisan	12
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pemberdayaan Masyarakat	14
1. Pengertian Pemberdayaan	14
2. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	18
3. Ekonomi Masyarakat	19
B. Ekonomi Syariah	21
1. Pengertian Ekonomi Islam	21
2. Konsep Pemberdayaan Dalam Islam	21
3. Strategi Pemberdayaan Dalam Islam	23
4. Konsep Distribusi Dalam Islam	24
5. Distribusi Dalam Islam	26
6. Kesejahteraan Sosial Dalam Islam	29
7. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam	31
C. Pemberdayaan Masyarakat Dekranasda (Dewan Kerajinan Nasional Daerah)	36
1. Pengertian Dekranasda	36
2. Tujuan Berdirinya Dekranasda	40
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Model dan Jenis Penelitian	42
B. Jenis dan Pendekatan Penelitian	42
C. Sumber Data	43
D. Teknik Pengumpulan Data	44
E. Teknik Analisis Data	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran umum lokasi penelitian	48
1. Sejarah berdirinya Dekranasda kabupaten Aceh Utara	48
2. Visi dan Misi Dekranasda Kabupaten Aceh Utara	48

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sekarang ini untuk berpartisipasi dalam membenah diri dalam menunjang ekonomi lebih terjamin dalam kehidupan sehari-hari banyak wadah dalam mewujudkannya. Memajukan ekonomi banyak kalangan mampu menjalankannya salah satunya adalah perempuan. Keterlibatan perempuan merupakan hal yang esensial. Oleh sebab itu, kepedulian yang holistik yang melihat sumber daya perempuan dengan peran kekhalifahannya di muka bumi dengan acuan pada nilai-nilai agama dan nilai luhur budaya bangsa, perlu di sinergiskan dalam dimensi publik dan domestik sekaligus. Dimensi publik menyangkut aspek perempuan di bidang iptek, ekonomi, ketenagakerjaan, politik dan ketahanan nasional.

Dimensi domestik mencakup aspek kesejahteraan keluarga, kesehatan hubungan keluarga, yang simetris dan lain-lain.¹ Perempuan adalah sosok yang kerap kali menjadi perbincangan yang tiada habisnya. Sesuatu yang menyangkut perempuan akan terus mendapat perhatian untuk dibicarakan, sekarang dapat kita perhatikan bahwasanya tidak terlihat yang mencolok perbedaan antara perempuan dan laki-laki, di karenakan sekarang ini perempuan dan laki-laki sama-sama mendapatkan pengakuan di lingkungan maupun lembaga tidak terjadinya diskriminasi yang ekstrim. Keduanya berkesempatan untuk memiliki status, dan

¹ Siti Aisyah, "Peran Perempuan Dalam Masyarakat Di Aceh (Studi Kasus Terhadap Pandangan Aktifis Pusat Studi Wanita UIN Arraniry Banda Aceh)", (Skripsi, Banda Aceh: UIN Arraniry, 2018, <https://repository.ar-raniry.ac.id/3628/>, diakses 12 Desember 2018).

peranan yang lainnya untuk membangun ekonomi maupun membangun kemajuan lainnya yang tidak menyalahi syariat Islam.²

Sejarah panjang yang dimiliki masyarakat Aceh membuktikan bahwa perempuan Aceh telah mengambil bagian dalam berbagai bidang, baik sebagai pemimpin di tingkat paling rendah sampai dengan pemimpin tertinggi di masyarakat. Dalam struktur masyarakat, perempuan mempunyai otonomi yang luas, yang mana tampak pada sebutan *po rumah* bagi perempuan. Di bidang lain terlihat dari adanya perempuan yang menjadi Sultanah (wanita kepala pemerintahan Kerajaan Aceh), laksamana (pemimpin angkatan perang), *ulee balang* (kepala kenegerian) dan tidak sedikit yang berperan sebagai pemimpin perlawanan terhadap penjajah, bahkan banyak pahlawan dari kita juga dari kaum perempuan.³

Jika kita mengkaji sejarah peran perempuan sangatlah berperan penting, banyak posisi yang pernah diraih oleh perempuan Aceh, bahkan menduduki hingga level otoritas kekuasaan. Baik pada masa kesultanan, kolonial Hindia dan Belanda, hingga dalam konteks negara kesatuan Indonesia. Hal tersebut merupakan manifestasi perempuan dalam upayanya membela hak-hak masyarakat Aceh, secara umum, juga pembelaan terhadap penganiayaan dan pelanggaran atas hak perempuan. Bahwa sejak dari dulu perempuan Aceh memiliki derajat yang

² Amirullah Syarbani, *Islam Agama Ramah Perempuan (Memahami Tafsir Agama Dengan Perspektif Keadilan Gender)*, (Jakarta: Prima Pustaka, 2013), h. 5.

³ Rusdi Sufi, Muhammad Ibrahim, Thamrin Z, Dkk, *Aceh Tanah Rencong*, Cet. I (Yogyakarta: Multi Media Press, 2008), h. 86.

tinggi, dan mempunyai hak-hak yang sama dengan laki-laki dalam hal memperjuangkan negara.⁴

Keinginan untuk tercukupi segala yang di butuhkan belum semua terpenuhi, karena semakin besar pengeluaran yang perlu di lakukan, banyak pihak berpikir bagaimana cara mengatasinya apa saja yang harus di lakukan untuk meningkatkan taraf hidup. Di antara yang dapat di lakukan salah satunya ialah untuk berwirausaha baik dalam bentuk modal kecil-kecilan, atau adanya produktifitas yang kreatif mengeluarkan ide-ide kreatif berinovasi terbaru untuk memecahkan masalah itu sendiri menemukan peluang-peluang baru untuk memperbaiki persoalan keidupan.⁵

Manusia adalah mahluk kerja yang ada persamaannya dengan hewan juga, bekerja dengan cara sendiri. Tetapi tentu lain dengan caranya. Hewan bekerja semata berdasarkan naluriah, tidak ada etos, kode etik atau permintaan akal. Tetapi manusia memilikinya harus punya etos dan pendayagunaan akal. Untuk meringkan beban tenaga kerja yang terbatas maupun meraih prestasi yang sehebat mungkin. Bilamana manusia bekerja tanpa etos, tanpa moral dan akhlak maka gaya kerja manusia meniru hewan, turun tingkat kerendahan. Demikian juga bilamana manusia bekerja tanpa menggunakan akal, maka hasil kerjanya tidak akan memperoleh kemajuan apa-apa.⁶

⁴ Muhammad Umar, *Peradaban Aceh Kilasan Sejarah Aceh Dan Adat*, (Banda Aceh: Yayasan Busafat, 2006), h. 42.

⁵ Aidil Fitra, "Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Usaha Rumahan (Home Industri) Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Di Kecamatan Kampar Timur", (Skripsi, Riau: UIN Sultan Syarif Kasim, 2013, <http://repository.uin-suska.ac.id/9801/>, diakses 12 Desember 2018).

⁶ Ni Farihah, Bab II Kajian Teori, 2014, <http://digilib.uinsby.ac.id/195/3/Bab%202.pdf>, h. 14. Diakses tanggal 22 Agustus 2019.

Etos juga mempunyai makna nilai moral yaitu suatu pandangan batin yang bersifat mendarah daging dengan menghasilkan pekerjaan yang baik, bahkan sempurna, nilai-nilai Islam yang di yakini dapat di wujudkan. Karenanya, etos bukan sekedar kepribadian atau sikap, melainkan lebih mendalam lagi, dia adalah martabat, harga diri, dan jati diri seseorang. Etos menunjukkan pula sikap dan harapan seseorang. Harapan di artikan sebagai keterpautan hati kepada yang di inginkannya terjadi di masa yang akan datang perbedaana antara harapan dengan angan-angan adalah bahwasanya angan-angan membuat seseorang menjadi pemalas dan terbuai oleh khayalannya tanpa mau mewujudkannya.⁷

Dalam Al-Qur'an Allah SWT berfirman dalam surat At-Taubah ayat 105

وَقُلِ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ
وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

Artinya: "Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan". (Q.S At-Taubah: 105)

Ayat ini memotivasi kepada kita untuk terus beramal dan bekerja dengan sungguh-sungguh. Sehingga memotivasi kita baik dalam beramal dan juga dalam bekerja. Proses itulah yang di lihat dan di nilai Allah. Bukan hasilnya. Allah tidak menilai kita berdasarkan hasil, tetapi berdasarkan proses. Apakah kita telah sungguh-sungguh beramal dan bekerja.

⁷ NI Farihah, Bab II Kajian Teori, 2014, <http://digilib.uinsby.ac.id/195/3/Bab%202.pdf>, h. 14. Diakses tanggal 22 Agustus 2019.

Dengan pemberdayaan terdapat kekuatan untuk berbuat, kekuatan untuk membangun kerjasama dan kekuatan dalam diri pribadi manusia. Adapun yang lebih menyeluruh untuk mengadakan pelatihan kerajinan untuk meningkatkan ekonomi keluarga, di Dekranasda mereka dapat mengapresiasi diri dalam membangun diri keluar dari yang namanya kebutuhan primer yang tidak tercukupi. Di sini perempuan dapat dengan mudah dalam melakukan yang namanya kerajinan perempuan yang di latih. Perempuan dapat membantu keluarganya keluar dari gejolak tidak tercukupi kebutuhan.

Kemajuan zaman sering di iringi dengan berkembangnya informasi dan tingkat kemampuan intelektual manusia. Peran perempuan dalam kehidupan pun terus berubah untuk menjawab tantangan jaman, tak terkecuali mengenai peran perempuan dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga. Biasanya, tulang punggung kehidupan keluarga adalah pria atau suami. Tapi kini para perempuan banyak yang berperan aktif untuk mendukung ekonomi keluarga. Perempuan tidak sekedar menjadi perhiasan rumah, tetapi juga banyak mempunyai peran dalam keluarga.

Pemberdayaan ekonomi kreatif di Lhokseumawe melalui kreatif yang namanya Dekranasda Nomor: 85/M/SK/3/1980 dan Nomor 072b/P/1980 tentang Pembentukan Dewan Kerajinan Nasional, Kabupaten Aceh Utara telah membentuk wadah dimaksud melalui Surat Keputusan Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Aceh Nomor : 016/A/SK/DEKRA/I/2013, tentang Pembentukan Pengurus Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kabupaten Aceh Utara Periode Tahun 2013-2017.

Pemberdayaan perempuan di lakukan oleh Dekranasda sudah mampu membangun ekonomi masyarakat, dari kerajinan mampu menciptakan usaha untuk bekerja dalam memenuhi kebutuhannya, hasil yang di berdayakan oleh Dekranasda melalui pemberdayaannya mampu meningkatkan daya saing, mampu mensejahterakan berbagai pihak. Dekranasda berperan penting sebagai etalase kerajinan di daerah, semakin besar peranannya dalam membina perajin guna menghadapi persaingan perekonomian global dengan tidak melupakan kualitas dan strategi pemasaran yang dapat di wujudkan di antaranya melalui pendekatan dengan memberi bimbingan dan pelatihan kepada perajin, sehingga dapat ikut memperkuat perekonomian daerah. Perkembangan kerajinan di wilayah Indonesia khususnya di Kabupaten Aceh Utara menciptakan suatu industri kerajinan yang keberadaannya telah memberikan kontribusi untuk meningkatkan pendapatan perajin, penciptaan lapangan usaha baru, pelestarian kebudayaan, dan meningkatkan kesejahteraan perajin.

Keberadaan Dekranasda Kabupaten Aceh Utara ke depan di harapkan dapat terus mendorong peningkatan harkat, martabat dan kesejahteraan para perajin serta menjembatani komunikasi dengan pemerintah dan seluruh mitra kerja perajin yang ada di Kabupaten Aceh Utara

Maka berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dan kajian sekaligus di jadikan pembahasan skripsi dengan Judul **“Pola Pemberdayaan Perempuan Melalui Program peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Oleh Dekranasda di Tinjau Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Kabupateh Aceh Utara)”**. Hasil

penelitian ini akan di deskripsikan dalam bentuk karya ilmiah yang akan di susun secara sistematis berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah yang ada di IAIN Lhokseumawe.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pemberdayaan yang di lakukan Dekranasda Terhadap Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri?
2. Bagaimana Tinjauan Ekonomi Islam Pola Pemberdayaan oleh Dekranasda?

C. Tujuan penelitian dan Manfaat penelitian

Berdasarkan pada pokok masalah di atas, tujuan yang ingin peneliti capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui Pemberdayaan yang di lakukan Dekranasda Terhadap Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
2. Menjelaskan Tinjauan Ekonomi Islam Pola Pemberdayaan oleh Dekranasda.

D. Manfaat Penelitian

Setiap penulisan di harapkan dapat bermanfaat baik secara praktis maupun teoritis. Maka hasil penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat secara praktis maupun teoritis, di antaranya sebagai berikut:

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi peneliti menjadi bekal ilmu pengetahuan, perluasan wawasan dalam ilmu ekonomi.
2. Memberikan kesadaran bagi masyarakat dan pembaca akan pentingnya pengetahuan tentang pemberdayaan
3. Sebagai bahan kajian, rujukan untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang ekonomi terutama bidang wirausaha (entrpreneurship) terutama pada Dekranasda di Lhokseumawe
4. Memberikan informasi kepada pelanggan bagaimana pemberdayaan yang terjadi pada Dekranasda di Lhokseumawe
5. Mencari kesesuaian antara teori yang telah didapatkan di bangku kuliah dengan kenyataan di lapangan.
6. Hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu mengenai pemberdayaan ekonomi kreatif oleh perempuan dalam meningkatkan ekonomi keluarga dalam perspektif ekonomi syariah

D. Kajian pustaka

Untuk melakukan penelusuran penelitian ini maka, peneliti melakukan pengkajian pada penelitian terdahulu yang mempunyai kaitan dan perbedaan dengan penelitian yang di tulis dan di kaji, berikut beberapa penelitian dalam bentuk buku maupun karya ilmiah. Beberapa karya tersebut antara lain adalah:

1. Penelitian yang dilakukan Ravik Karsidi, tahun 2007 bahwa perkembangannya semakin meningkatkan atau menghasilkan kinerja yang lebih meningkat program-program yang menyangkut pengembangan UKM dibagikan dibagikan koordinasi berbagi peran antara *stakeholder* sehingga hasilnya lebih optimal hasilnya.⁸
2. Penelitian yang dilakukan oleh Winar Nur Aisyah Fatimah, tahun 2016 dengan dalam penelitian ini dijelaskan bahwa banyak tempat yang tidak digunakan atau belum termanfaatkan dengan baik mereka belum maksimal dalam menjalankannya tetapi sedikit demi sedikit ada beberapa masyarakat yang pendapatannya bertambah setiap bulan sebesar Rp.50.000.⁹
3. Penelitian yang dilakukan oleh Merla Liana Herawati, tahun 2014 dalam penelitian ini dijelaskan bahwa hasilnya semakin adanya perkembangan pesat dijual bukan hanya dalam daerah setempat namun

⁸ Ravik Karsidi, "Pemberdayaan Masyarakat Untuk Usaha Kecil Dan Mikro (Pengalaman Empiris di Wilayah Surakarta Jawa Tengah)", (*Jurnal P Enyuluhan, November 2007, Vol. 3 No. 2*, https://www.academia.edu/37331627/peran_pendampingan_dalam_mendorong_perkembangan_usaha_anggota_bmt_studi_pada_ksubmt_umj_skripsi_diajukan_untuk_memenuhi_salah_satu_syarat_memperoleh, diakses tanggal 29 november 2018).

⁹ Winar Nur Aisyah Fatimah, "Karanganyar Hijau Sebagai Program Pemberdayaan Masyarakatn di Desa Karanganyar", (*Jurnal Care Jurnal Resolusi Konflik, Csr, Dan Pemberdayaan, Juni 2016, Vol. 1 (1)*, <http://journal.ipb.ac.id/index.php/jurnalcare/article/download/15297/11193>, diakses tanggal 26 November 2018).

kemajuannya sangatlah tinggi, tempurung kelapa adalah usaha ekonomi kreatif yang memanfaatkan bahan baku lokal, kerajinan tangan ini di pasaran bisa dijual dengan nilai tinggi untuk meningkatkan perekonomian warga tersebut.¹⁰

4. Hasil dari penelitian ini adalah. Pertama, strategi dalam pemberdayaan masyarakat oleh pengurus PKK Kampung Demangan RW 05 melalui lima tahap diantaranya adalah: (1) tahap sosialisasi. (2) tahap fasilitasi (3) tahap pemetaan tempat (4) tahap perencanaan (5) tahap pelaksanaan. Kedua, hasil pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pengurus PKK dalam pemberdayaan masyarakat di Kampung Demangan RW 05, menunjukkan bahwa pengurus PKK Kampung Demangan berperan dalam pemenuhan kebutuhan dasar, jangkauan sumber produktif, dan partisipasi dalam proses pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama pada kondisi sosial serta ekonomi masyarakat.¹¹
5. Penelitian oleh Aal Andayani, tahun 2015 dalam penelitian ini di jelaskan bahwa pemberdayaan yang di lakukan di Desa Wisata Penglipuran berlangsung dengan beberapa tahap, yaitu tahap penyadaran, pengkapasitasan dan pemberian daya. Dalam pemberdayaan tersebut memang ada kendala-kendala yang harus di

¹⁰ Merla Liana Herawati, "Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Kerajinan Tempurung Kelapa: Studi Kasus Di Dusun Santan, Guwosari, Pajangan, Bantul", (Skripsi, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014, <http://digilib.uin-suka.ac.id/13800/>, diakses tanggal 26 November 2018).

¹¹ Saparwadi, "Strategi Pemberdayaan Masyarakat Oleh Pengurus Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (PKK): Studi di Kampung Demangan RW 05, Kelurahan Demangan, Kecamatan Gondokusuman", Yogyakarta, Skripsi Thesis, (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016). h. 10.

lalui, akan tetapi pemberdayaan di desa tersebut mampu memberikan *implikasi* terhadap tata nilai sosial, budaya dan lingkungan.¹²

Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada fokus penelitian, pada penelitian sebelumnya lebih fokus terhadap perkembangan ekonomi, sedangkan pada penelitian ini lebih di fokuskan kepada Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Program Peningkatan Kemampuan Teknologi dari Dekranasda (Dewan Kerajinann Nasional Daerah)

E. Definisi operasional

Untuk menghindari adanya kesalahpahaman dalam skripsi ini, maka penulis memberikan batasan istilah dalam penelitian ini, yang berupa pengertian yang diungkapkan sebagai berikut:

1. Pemberdayaan

Pemberdayaan ialah suatu upaya yang dilakukan untuk membuat masyarakat berdaya untuk meningkatkan kemampuan baik itu dari keterampilannya yang di milikinya, yang dapat membuat dirinya ada perkembangan yaitu bisa melalui pelatihan-pelatihan, agar mereka lebih mandiri secara materi atau sosial.¹³

2. Perempuan

Perempuan adalah sosok yang perkasa dan di balik kelembuatn sifatnya terdapat kekuatan dan potensi yang luar biasa, kekuatan dan potensi inilah

¹² Aal Andayani, "pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata dan Implikasinya Terhadap ketahan Sosial Budaya Wilayah (Studi di Desa Wisata Penglipuran Bali)", (Jurnal Ketahan Nasional, 27 April 2017, vol.23, No.1, <https://jurnal.ugm.ac.id/jkn>, diakses tanggal 23 Agustus 2019.

¹³ Onny S. Prijono dan A.M.W pranarka, *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan, dan Implementasi*, (Jakarta: CSIS, 1996), h. 62.

yang kemudian mampu membuat menjadi sosok mandiri, yang mampu menggerakkan peningkatan perekonomian.¹⁴

3. Dekranasda

Dekranasda adalah organisasi yang didirikan guna untuk membantu masyarakat yang sudah ada skill menjadi lebih bisa lagi.¹⁵

4. Ekonomi Islam

Ekonomi Islam adalah suatu ilmu pengetahuan berupaya menganalisis dan akhirnya menyelesaikan paradigma-paradigma, dengan cara syariah atau berdasarkan Al-Qur'an atau Hadist.¹⁶

F. Sistematika penulisan

Untuk memperoleh gambaran yang bersifat menyeluruh, serta ada keterkaitan antar bab yang satu dengan yang lain dan untuk lebih mempermudah dalam proses penulisan skripsi ini, perlu adanya sistematika penulisan, adapun sistematika dalam penulisan ini akan melalui beberapa tahapan bahasan, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini akan dikemukakan mengenai latar belakang masalah dari penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, definisi operasional dan sistematika penulisan.

¹⁴ Wikipedia, http://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Kerajinan_Nasional, tanggal akses 29 November 2018.

¹⁵ Wikipedia, http://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Kerajinan_Nasional, tanggal akses 29 November 2018.

¹⁶ Muhammad, *Ekonomi Islam*, (Malang: Empat Dua, 2009), h. 135.

BAB II : LANDASAN TEORI

Dalam bab ini penulis mencoba memberikan gambaran umum mengenai pengertian

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini akan di fokuskan pada pembahasan metode penelitian. Yang meliputi: jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Bab ini berisi hasil penelitian serta pembahasannya yang di sesuaikan dengan metode penelitian pada bab tiga, sehingga akan memberikan perbandingan hasil penelitian.

BAB V : PENUTUP

Pada bab terakhir ini memuat kesimpulan dari beberapa bab terdahulu, di samping itu akan di kemukakan saran-saran dan di akhiri dengan penutup.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pemberdayaan Masyarakat

1. Pengertian Pemberdayaan

Secara konseptual pemberdayaan atau pemberkuasaan (*Empowerment*), berasal dari kata "power" (kekuasaan atau keberdayaan). Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka mempunyai kekuasaan atau kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan dan kesakitan, menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka butuhkan, serta berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.¹⁷

Pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan, kekuasaan seringkali dikaitkan dengan kemampuan kita dalam untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka. Ilmu sosial tradisional menemukan bahwa kekuasaan berkaitan dengan pengaruh dan kontrol. Pengertian ini mengasumsikan bahwa kekuasaan sebagai sesuatu yang tidak berubah atau tidak dapat dirubah.¹⁸

Pengertian pemberdayaan (*empowerment*) atau disebut dengan *tamkin* dari berbagai sumber tersebut, maka penulis menyimpulkan pengertian pemberdayaan

¹⁷ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Bandung: Refika Aditama, 2006), h. 59.

¹⁸ *Ibid.*, h. 59.

itu adalah memberikan kekuatan kepada orang-orang yang tidak mempunyai daya atau yang tidak berdaya mampu memiliki kemampuan untuk mengubah dirinya baik secara individu atau bersama untuk mempunyai kekokohan dan menjadi berdaya sehingga mempunyai pengaruh agar selalu meningkatkan kualitas hidupnya.

Pemberdayaan yang kini gencar menjadi program pengentasan kemiskinan oleh Pemerintah adalah pembangunan pada masyarakat desa. Pembangunan masyarakat desa dapat di definisikan sebagai suatu proses di mana orang-orang secara bersama-sama dengan pejabat-pejabat pemerintah berusaha untuk memperbaiki keadaan perekonomian, sosial, dan kebudayaan dalam masyarakat yang bersangkutan, mengintegrasikan masyarakat ini dalam kehidupan bangsa dan dapat membantu membangun bangsa dan negara.¹⁹

Program pemberdayaan masyarakat di rumuskan dan di dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan *bottom up*, dimana pada pelaksanaan di lapangan, di lakukan atas inisiatif dan aspirasi dari masyarakat, mulai dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pengawasan pelaksanaan pembangunan. Masyarakat memiliki peran yang sangat penting dan di tuntutan untuk terlibat secara aktif dalam pelaksanaan program pembangunan ini, berhasil atau tidaknya pelaksanaan program ini ditentukan oleh partisipasi masyarakat itu sendiri.²⁰

Pemberdayaan masyarakat pada dasarnya menyangkut lapisan-lapisan bawah atau lapisan masyarakat yang kurang mampu yang di nilai tertindas oleh

¹⁹ Irawan, M. Suparmoko, *Ekonomika Pembangunan*, Edisi Keenam, Cet. II (Yogyakarta: Bpfe, 2008), h. 308.

²⁰ Suhartini A. Halim, dkk, *Model-Model Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005) h. 8.

sistem dan dalam struktur sosial. Upaya pemberdayaan masyarakat ini terdiri dari beberapa segi yaitu:

- 1) Penyadaran tentang peningkatan kemampuan untuk mengidentifikasi persoalan atau permasalahan yang menimbulkan kesulitan hidup dan penderitaan yang di alami oleh masyarakat.
- 2) Penyadaran tentang kelemahan maupun potensi yang di miliki sehingga menimbulkan dan meningkatkan kepercayaan pada diri sendiri untuk keluar dari persoalan dan guna memecahkan permasalahan serta mengembangkan diri.
- 3) Meningkatkan kemampuan manajemen sumber daya yang telah di miliki.

Prosedur yang di lakukan dalam pemberdayaan ekonomi rakyat yang di dasarkan pada teori *empowering* adalah: *pertama*, membangkitkan (*enabling*). Pada umumnya, ketidakberdayaan terjadi karena tidak di kenalinya potensi yang di milikinya. Pada dasarnya proses *enabling* di lakukan untuk membangkitkan kemauan rakyat yang banyak di pengaruhi oleh persepsi dan pengetahuan atas diri dan lingkungannya. *Kedua*, memampukan (*empowering*), pada tahap ini bertujuan agar rakyat menjadi mampu atau bahkan lebih mampu dengan di bekali pengetahuan dan bantuan materil. *Ketiga*, perlindungan (*protektion*), yaitu proses penguatan atau perlindungan terhadap masyarakat dengan memberikan jalan keluar untuk beberapa kesulitan yang dihadapi.²¹

Dalam persepektif Islam, menurut Nanich Machendrawaty dan Agus Ahmad Safei, adalah jelas bahwa Islam pada dasarnya merupakan agama

²¹ Juhaya S.Pradja, *Ekonomi Syariah*, (Bandung: Pustaka, 2015) h. 188.

pemberdayaan. Dalam pandangan Islam, pemberdayaan harus merupakan gerakan yang berkesinambungan, sesuai dengan paradigma Islam itu sendiri sebagai agama gerakan dan perubahan. Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat pada dasarnya adalah satu metode pekerjaan sosial dan gerakan sosial tujuannya untuk memperbaiki kualitas hidup manusia melalui pendayagunaan sumber-sumber yang ada pada masyarakat serta menekankan pada prinsip-prinsip partisipasi sosial.²²

Sebagai gerakan sosial, pemberdayaan masyarakat tidak hanya sekedar membantu masyarakat dalam mengatasi kesulitan-kesulitan atau masalah-masalah yang mereka hadapi. Lebih dari itu, pemberdayaan masyarakat di maksudkan terutama sebagai usaha untuk membangun kemandirian masyarakat. Kemandirian dalam konteks ini mempunyai makna bahwa masyarakat mampu menformulasikan sendiri kebutuhan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring atas penyelenggaraan aktivitas kehidupan mereka, sehingga mereka mampu mengatasi permasalahan mereka sendiri. Singkatnya, orientasi pemberdayaan masyarakat adalah membangun kemandirian masyarakat agar mereka semua terbebas dari kemiskinan, keterbelakangan, dan aneka bentuk diskriminasi sosial.

Secara umum pemberdayaan memiliki berbagai macam pengertian, untuk lebih memahami mengenai makna dari pemberdayaan akan di sajikan beberapa pengertian pemberdayaan dari berbagai tokoh, di antaranya adalah sebagai berikut: Menurut Eddy Papilaya yang di kutip oleh Zubaedi, bahwa pemberdayaan adalah upaya untuk membangun kemampuan masyarakat, dengan

²²Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dan Pekerjaan Sosial*, (Bandung: Reflika Aditama Cet. II, 2006), h. 37.

mendorong, memotivasi, membangkitkan kesadaran akan potensi yang di miliki dan berupaya untuk mengembangkan potensi itu menjadi tindakan nyata.²³

2. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Pemberdayaan menurut bahasa berasal dari kata daya yang berarti tenaga/ kekuatan, proses, cara, perbuatan memberdayakan. Pemberdayaan adalah upaya yang membangun daya masyarakat dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang di miliki serta berupaya untuk mengembangkannya. Pemberdayaan diarahkan guna meningkatkan ekonomi masyarakat secara produktif sehingga mampu menghasilkan nilai tambah yang tinggi dan pendapatan yang lebih besar. Upaya peningkatan kemampuan untuk menghasilkan nilai tambah paling tidak harus ada perbaikan akses terhadap empat hal, yaitu:

- 1) Akses terhadap sumber daya
- 2) Akses terhadap teknologi
- 3) Akses terhadap pasar
- 4) Akses terhadap permintaan.

Pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah penguatan pemilikan faktor-faktor produksi, penguatan penguasaan distribusi dan pemasaran, penguatan masyarakat untuk mendapatkan gaji/upah yang memadai, dan penguatan masyarakat untuk memperoleh informasi, pengetahuan dan ketrampilan, yang harus di lakukan secara multi aspek, baik dari aspek masyarakatnya sendiri, maupun aspek kebijakannya. Karena persoalan atau isu strategis perekonomian

²³Zubacdi, *Wacana Pembangunan Alternatif: Ragam Perspektif Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta: Ar-Ruzz Media,2007), h. 42.

masyarakat bersifat lokal spesifik dan problem spesifik, maka konsep dan operasional pemberdayaan ekonomi masyarakat tidak dapat di formulasikan secara umum/lazim. Usaha memformulasikan konsep, pendekatan, dan bentuk operasional pemberdayaan ekonomi masyarakat secara umum, memang penting, tetapi yang jauh lebih penting, adalah pemahaman bersama secara jernih terhadap karakteristik permasalahan ketidakberdayaan masyarakat di bidang ekonomi. Sebab dengan pemahaman yang jernih mengenai ini, akan lebih produktif dalam memformulasikan konsep, pendekatan, dan bentuk operasional pemberdayaan ekonomi masyarakat yang sesuai dengan karakteristik permasalahan lokal.²⁴

3. Ekonomi masyarakat

Segala kegiatan ekonomi dan upaya masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (*basic need*) yaitu sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan. Dengan demikian dapat di pahami bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan satu upaya untuk meningkatkan kemampuan atau potensi masyarakat dalam ekonomi guna memenuhi kebutuhan hidup serta meningkatkan kesejahteraan mereka dan dapat berpotensi dalam proses pembangunan nasional.²⁵

Meningkatkan kesejahteraan ekonomi merupakan kegiatan pemberdayaan dalam masyarakat. Ekonomi dapat di artikan sebagai pengelola rumah tangga.

²⁴ Yardi Yatmo Hutomo, "Pemberdayaan Masyarakat Dalam Bidang Ekonomi: Tinjauan Teoritik Dan Implementasi", (*Jurnal* No. 20, Juni-Juli 2000, h. 3, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/download/23581/23267>, diakses tanggal 30 April 2019).

²⁵ NR Nastiti, Bab II Kajian Teori, 2014, <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/117/3/bab2.pdf>, h. 1. diakses tanggal 30 April 2019.

B. Ekonomi Syariah

1. Pengertian Ekonomi Islam

Sistem ekonomi Islam adalah suatu sistem ekonomi Islam di dasarkan pada ajaran dan nilai nilai Islam, yang bersumber pada *Al- Qur'an, As-Sunnah, Ijma* dan *Qiyas* atau sumber lainnya.

Dari definisi tentang ekonomi Islam yang ada, maka dapat kita simpulkan bahwa ekonomi Islam adalah Ilmu yang mempelajari bagaimana manusia dalam memenuhi kebutuhan kehidupannya sehari-hari, sesuai lingkaran ekonomi Islam.

2. Konsep Pemberdayaan Dalam Islam

Konsep pemberdayaan ini muncul karena adanya kegagalan sekaligus harapan. Kegagalan yang dimaksud adalah gagalnya model-model pembangun ekonomi dalam menanggulangi masalah kemiskinan dan lingkungan yang berkelanjutan. Sedangkan harapan, muncul karena adanya alternatif pembangunan yang memasukkan nilai-nilai *demokrasi*, *persamaan gender*, dan pertumbuhan ekonomi yang memadai.²⁷

Dalam upaya pemberdayaan masyarakat dapat di lihat dari tiga sisi, yaitu:

- 1) Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*embling*). Di sini titik tolaknya adalah pengendalian bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki poteni yang dapat di kembangkan. Artinya tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya, karena jika demikinakan sudah punah. Pemberdayaan adalah upaya membangun daya itu, dengan mendorong, memotivasikan, dan

²⁷ Putri Zuraina, "Tinjauan Ekonomi Syariah Tentang Pelaksanaan penyaluran Bantuan Modal Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) (Studi Kasus di Desa Keude Matang Panyang Kec. Tanah Pasir)". (Skripsi, Lhokseumwe: IAIN Lhokseumawe, 2017), h. 12.

membangkitkan kesadaran akan potensi yang di milikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.

- 2) Memperkuat potensi atau daya yang di miliki masyarakat (*empowering*).
Dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah lebih positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana. Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (*input*), serta pembukaan akses ke dalam berbagai peluang (*opportunities*) yang akan membuat masyarakat menjadi berdaya. Dalam rangka pemberdayaan ini, upaya yang sangat substansial adalah peningkatan taraf pendidikan, dan derajat kesehatan, serta akses ke dalam sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti modal, teknologi, informasi, lapangan kerja, dan pasar. Masukan berupa pemberdayaan ini menyangkut pembangunan prasarana dan sarana dasar fisik, seperti irigasi, jalan, listrik, mau pun sosial seperti sekolah dan fasilitas pelayanan kesehatan, yang dapat di jangkau oleh masyarakat pada lapisan paling bawah, serta ketersediaan lembaga-lembaga pendanaan, pelatihan, dan pemasaran di pendsaan, di mana terkonsentrasi pada penduduk yang keberadaannya sangat kurang, untuk itu perlu ada program khusus bagi masyarakat yang kurang berdaya, karena program-program umum yang berlaku tidak selalu dapat menyentuh lapisan masyarakat lain.
- 3) Memberdayakan mengandung pula arti melindungi, dalam proses pemberdayaan harus di cegah yang lemah menjadi bertambah kuat, oleh karena kekurangan pemberdayaan dalam menghadapi yang kuat. Oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat sangat

mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Melindungi tidak berarti mengisolasi atau menutupi dan interaksi, karena hal itu justru akan mengerdikan yang kecil dan menunglakan yang lemah.²⁸

3. Strategi Pemberdayaan Dalam Islam

Strategi pemberdayaan masyarakat melalui kebijakan fiskal menurut Islam bisa di lakukan dengan beberapa cara diantaranya:

- 1) Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi Menurut Islam pengadaan pendidikan pada zaman sekarang harus di lakukan untuk setiap penduduk, maka dari itu anggaran pemerintah perlu di arahkan kepada pendidikan dasar dan menengah.
- 2) Memenuhi kebutuhan dasar manusia Pengadaan *market good* dan *private good* sudah seharusnya di lakukan oleh negara dan lembaga-lembaga swasta. Misalnya mengenai penyediaan air bersih atau air minum di daerah-daerah yang langka air. Negara mempunyai kewajiban untuk pengadaannya. Disini masyarakat lokal bisa mengambil prakarsa untuk pengadaan air secara swadaya, tentu saja dengan bantuan masyarakat setempat.
- 3) Menggratiskan fasilitas kesehatan Kesehatan memang merupakan *private good* masyarakat. Tetapi meskipun begitu pengadaannya tidak bisa sepenuhnya diserahkan kepada masyarakat, pemerintah bisa membantu dengan menyediakan *primary health care*, atau kesehatan umum (*public health*) yang tergolong kedalam *public good*. Dengan kata lain kesehatan

²⁸ *Ibid.*, h. 15.

dasar adalah suatu *collective good* yang di putuskan bersama-sama oleh masyarakat dan pemerintah.

- 4) Memberantas kemiskinan dan kepincangan pendapatan masyarakat, di sini pemerintah bisa membentuk dan menciptakan proyek-proyek padat karya bagi masyarakat, pembentukan unit-unit usaha yang bersifat kekeluargaan dan kerjasama.²⁹

Peranan negara di pandang penting sebagai perwujudan pelaksanaan amanah untuk mengembangkan dan memelihara kelestarian sumber daya alam melalui perundang-undangan dengan berdasarkan syari'ah. Namun pelaksanaan amanah itu perlu di imbangi dengan partisipasi masyarakat yang berdasarkan swadaya. Kebijakan fiskal di samping melaksanakan fungsi *stabilisator* dan fungsi distribusi untuk menciptakan keadilan sosial, juga berfungsi mengarahkan alokasi sumberdaya, melalui berbagai fasilitas *insentif*, sehingga bisa mendorong masyarakat untuk meningkatkan kemampuan swadaya dalam memecahkan masalah-masalah mereka sendiri secara lebih mandiri dan tidak tergantung pada pemerintah.³⁰

4. Konsep Distribusi Dalam Islam

Dalam kegiatan ekonomi, kegiatan distribusi tidak hanya sekedar membagi-bagi atau menyalurkan barang, tetapi mempunyai pengertian yang lebih luas lagi. Kegiatan itu antara lain meliputi; perdagangan, pengangkutan, penyimpanan, penanggungan resiko, dan seterusnya sampai barang yang bersangkutan diterima oleh konsumen dalam keadaan baik.

²⁹ M. Dawam Rahardjo, *Islam dan Transformasi Sosial, Ekonomi, Lembaga Studi Agama dan Filsafat*, (Yogyakarta, 1999), h. 389.

³⁰ *Ibid.*, h. 79.

Konsep Distribusi Menurut Muhammad Baqir Ash-Shadr membagi bahasannya kedalam dua bagian, misalnya, distribusi Pra produksi dan distribusi pasca produksi. Menjadi seorang ahli hukum tradisional, penampilan Sadr menjadi dasar atas ajaran hukum yang berkenaan dengan kepemilikan dan hak distributif.

1) Teori Distribusi Pra Produksi

Pada dasarnya mendiskusikan distribusi dari tanah dan sumber alam yang lain, di masukan sebagai kekayaan primer. Dalam mendiskusikan status kepemilikan sumber alam, Sadr membagi sumber alam ke dalam empat kategori, misalnya. daratan, bahan baku (sumber alam) di daratan, air alami dan sisanya kekayaan (sungai/hasil laut, bintang, tumbuh-tumbuhan).

2) Distribusi Kekayaan (Publik) Pada dua Tingkatannya

Sadr memandang sistem ekonomi Islam memiliki format kepemilikan bersama yang berbeda. Menurutnya, format kepemilikan tersebut ada dua yakni kepemilikan pribadi dan kepemilikan perusahaan secara bersama.

- a. Kepemilikan pribadi terbatas pada hak memetik hasil, prioritas dan hak berguna untuk menghentikan orang lain dari penggunaan milik seseorang. Dalam prakteknya tidak ada kepemilikan pada individu. Hal ini sama dengan pendapat Taleghani (*seorang alim*) yang membedakan antara kepemilikan (hanyalah Allah semata) dan pemilikan (yang dapat diwarisi kepada individu).
- b. kepemilikan perusahaan secara bersama; Kepemilikan publik, milik negara.

Sadr membagikan Distribusi kekayaan berjalan pada dua tingkatan; yang pertama adalah distribusi sumber-sumber produksi, sedangkan yang kedua adalah distribusi kekayaan produktif. Yang di maksud dengan sumber-sumber produksi adalah; tanah, bahan-bahan mentah, alat-alat dan mesin yang di butuhkan untuk memproduksi beragam barang dan komoditas, yang mana semua ini berperan dalam proses produksi pertanian (*agricultural*) dan proses produksi industri atau dalam keduanya. Yang dimaksud dengan kekayaan produktif adalah komoditas (barang-barang modal dan aset tetap *fixed asset* yang merupakan hasil dari proses kombinasi sumber-sumber produksi yang di lakukan manusia.

Dari sini dapat di pahami bahwa yang menjadi titik awal atau tingkatan pertama dalam sistem ekonomi Islam adalah distribusi, bukan produksi sebagaimana dalam ekonomi-politik tradisional. Dalam sistem ekonomi Islam, distribusi sumber-sumber produksi mendahului proses produksi, dan setiap organisasi yang terkait dengan proses produksi otomatis berada pada tingkatan kedua.³¹

5. Distribusi dalam Islam

Pemerintah berperan secara aktif dalam sistem distribusi ekonomi di dalam mekanisme pasar Islami yang bukan hanya bersifat temporer dan minor, tetapi pemerintah mengambil peran yang besar dan penting. Pemerintah bukan hanya bertindak sebagai 'wasit' atas permainan pasar (*al-muhtasib*) saja, tetapi ia akan berperan aktif bersama-sama pelaku-pelaku pasar yang lain. Pemerintah akan bertindak sebagai perencana, pengawas, produsen sekaligus konsumen bagi

³¹ Rian Maulana, "Konsep Distribusi Menurut Muhammad Baqir As-Shadr, *Al-Iqtishad*", *Jurnal*, Juli 2010, Vol. II, No. 2, h. 95, <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/iqtishad/article/view/2486>, diakses tanggal 21 februari 2019).

aktivitas pasar. Mekanisme sistem distribusi ekonomi Islam dapat di bagi menjadi dua (2) yaitu mekanisme ekonomi dan mekanisme non-ekonomi.

1) Mekanisme ekonomi meliputi:

- a. Membuka seluas-luasnya bagi berlangsungnya sebab-sebab hak milik dalam hal pribadi yang berkaitan dengan hak milik pribadi menurut An-Nabhani (1990), yakni: 1. Bekerja, 2. Warisan, 3. Kebutuhan akan harta untuk menyambung hidup, 4. Harta pemberian negara yang di berikan kepada rakyat, 5. Harta-harta yang di peroleh untuk seseorang dengan tanpa mengeluarkan harta atau tenaga apapun.
- b. Memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi berlangsungnya pengembangan hak milik melalui kegiatan investasi.
- c. Larangan menimbun harrta benda walaupun telah di keluarkan zakatnya. Harta yang di timbun tidak berfungsi ekonomi, pada gilirannya akan menghambat distribusi karena tidak terjadi perputaran harta.
- d. Membuat kebijakan agar harta beredar secara luas serta menggalakkan berbagai kegiatan *syirkah* dan mendorong pusat-pusat pertumbuhan.
- e. Pemanfaatan secara optimal hasil dari barang (SDA) milik umum yang di kelola negara, seperti pemanfaatan secara optimal hasil dari barang, seperti pemanfaatan secara optimal hasil dari barang (SDA) milik umum yang di kelola negara, seperti hasil hutan, barang tambang, minyak, air, dan sebagainya dari kesejahteraan rakyat.³²

³² Muhammad Firlidi Noor Salim, "Distribusi Dalam Ekonomi Islam", (internet), (PDF) *Distribusi dalam Ekonomi Islam Firlidi ns - Academia.edu*, h. 4, diakses 30 april 2019.

Pemerintah berperan dalam mekanisme ekonomi, yang secara garis besar dapat di klasifikasikan menjadi tiga bagian, yaitu *pertama*, peran yang berkaitan dengan implementasi nilai dan moral Islam; *kedua*, peran yang berkaitan dengan teknis operasional mekanisme pasar; dan *ketiga*, peran yang berkaitan dengan kegagalan pasar. Ketiga peran ini mengacu pada konsep *al-hisbah* pada masa Rasulullah sebagai Lembaga khusus yang berfungsi untuk mengontrol pasar dari praktek-praktek yang menyimpang. Dengan ketiga peran ini di harapkan akan mampu mengatasi berbagai persoalan ekonomi karena posisi pemerintah tidak hanya sekedar sebagai perangkat ekonomi, tetapi juga memiliki fungsi religius dan sosial.

Sedangkan mekanisme non-ekonomi adalah mekanisme yang tidak melalui aktivitas ekonomi produktif melainkan melalui:

- a. aktivitas non-produktif (seperti pemberian hibah, sedekah, zakat dan warisan).

Mekanisme non-ekonomi di maksudkan untuk melengkapi mekanisme ekonomi, yaitu untuk mengatasi distribusi kekayaan yang tidak berjalan sempurna, jika hanya mengandalkan mekanisme ekonomi semata. Faktor penyebab alamiah, seperti keadaan alam yang tandus atau terjadinya musibah bencana alam. Semua ini akan dapat menimbulkan terjadinya kesenjangan ekonomi dan terhambatnya distribusi kekayaan kepada orang-orang yang memiliki keadaan tersebut. Mekanisme non-ekonomi juga di perlukan karena adanya faktor-faktor penyebab non-alamiah, seperti adanya penyimpangan mekanisme ekonomi. Penyimpangan mekanisme ekonomi, seperti monopoli,

penyimpangan distribusi, penimbunan, dan sebagainya dapat menimbulkan ketimpangan distribusi kekayaan. Untuk itu, di perlukan peran pemerintah untuk mengatasi berbagai permasalahan ekonomi ini. Bentuk-bentuk pendistribusian harta dengan mekanisme non-ekonomi ini, sebagaimana di kemukakan oleh al-Jawi antara lain adalah:

- a. Pemberian harta negara kepada warga negara yang di nilai memerlukan.
- b. Pemberian harta zakat yang di bayarkan oleh muzakki kepada para mustahik.
- c. Pemberian infaq, sedekah, wakaf, hibah dan hadiah dari orang yang mampu kepada yang memerlukan.
- d. Pembagian harta waris kepada ahli waris, dan lain-lain.³³

6. Kesejahteraan Sosial dalam Islam

Perhatian Islam sangat memperhatikan kesejahteraan sosial penganutnya, dan Allah SWT sebagai Tuhan menganjurkan umat Islam secara langsung di dalam Al-Qur'an untuk memperhatikan kesejahteraan sosial. Hal ini memperkuat posisi Islam sebagai *the of way of life* dari Al-Qur'an sebagai kitab suci sekaligus pedoman manusia dalam mengarungi kehidupan di dunia serta di hari akhir kelak.

Umar Capra menyatakan bahwa Islam datang sebagai agama terakhir yang bertujuan untuk mengantarkan pemeluknya kepada kebahagiaan hakiki. Kebahagiaan hakiki adalah kebahagiaan lahir batin, jasmani dan rohani, luar dan dalam fisik dan ruh manusia. Jika kebahagiaan jasmani dapat terpenuhi dengan

³³ Anita rahmawati, "Distribusi Dalam Ekonomi Islam Upaya Pemerataan Kesejahteraan Melalui Keadilan Distributif", (*Jurnal*, Juni 2013, Vol. 1, No. 1, h. 11-12, journal.Stainkudus.Ac.Id/Index.Php/Euilibrium/Article/Download/198/Pdf, diakses 30 April 2019).

hal-hal materil, kebutuhan rohani dapat di penuhi dengan ketaatan dan kedekatan kepada Allah SWT.

Dalam surat Quraisy ayat 3-4 Allah SWT terdapat tiga indikator kesejahteraan sosial dalam Islam, yaitu :

- 1) Tauhid
- 2) Pemenuhan Konsumsi
- 3) Hadirnya Rasa Aman dan Nyaman

Jika para ilmuan sosial mengartikan kesejahteraan sosial adalah pemenuhan kebutuhan dan kenyamanan, Islam hadir dengan konsep yang berbeda dengan adanya tambahan indikator spiritual, yaitu Tauhid. Artinya manusia harus percaya dan menyakini akan tuhan mereka, Allah SWT dan juga menyembah sesuai dengan apa yang telah di syariatkan Allah SWT dan di contohkan oleh Rasulullah.

Allah SWT dan Rasulullah SAW telah menganjurkan kita bahwa untuk sejahtera tidak cukup hanya memenuhi kebutuhan konsumsi dan adanya rasa aman saja, melainkan harus didasari dan ditopang oleh Tauhid, yaitu aspek spiritualitas kita terhadap Allah SWT.

فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ ۗ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ ۗ

Artinya: Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan Pemilik rumah ini (Ka'bah). Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan. (Q.S. Al-Quraisy: 3-4)

Di sisi lain, ayat ini juga memberikan pemahaman bagi kita bahwa untuk sejahtera kita harus mampu memenuhi kebutuhan pokok kita, dalam ayat tersebut di sebutkan “memberikan makan” atau pemenuhan kebutuhan konsumsi.

Dalam ilmu ekonomi setidaknya kita dapat memenuhi kebutuhan sandang (pakaian), pangan (makanan), dan papan (tempat tinggal). Hal ini mengindikasikan bahwa umat Islam harus merdeka secara ekonomi, kemerdekaan akan ekonomi akan mempermudah manusia untuk mencapai kesejahteraan sosialnya.

Selain itu, hadirnya rasa aman juga indikator kesejahteraan berdasarkan ayat ini, hal ini membuktikan bahwa dalam membangun kesejahteraan sosial, harus ada peran pemerintah yang berkewajiban dalam menyelenggarakan Negara, dalam hal ini adalah memberikan rasa aman bagi masyarakatnya. Tidak ada kesejahteraan sosial dibawah bayang-bayang ketakutan, tidak ada kesejahteraan di Negeri yang dipenuhi dengan perang, oleh karena itu, dalam mewujudkan kesejahteraan sosial, harus ada peran pemerintah dan masyarakat sipil dalam rangka menghadirkan rasa aman, nyaman dan tenteram.³⁴

7. Prinsip - Prinsip Ekonomi Islam

Nilai-nilai Tauhid (ke Esaan Tuhan), *'adl* (keadilan), *nubuwwah* (kenabian), *khilafah* (pemerintah, dan *ma'ad* (hasil) menjadi inspirasi untuk membangun teori-teori ekonomi Islam:

- 1) Prinsip Tauhid merupakan pondasi ajaran Islam. Dengan tauhid, manusia menyaksikan bahwa "Tiada sesuatu pun yang layak di sembah selain Allah dan "tidak ada pemilik langit, bumi dan isinya, selain daripada Allah" karena Allah adalah pencipta alam semesta dan isinya dan sekaligus pemiliknya,

³⁴ Mhd. Handika Surbakti, "Konsep Kesejahteraan Sosial Dalam Islam Berdasarkan Al-Qur'an", (Jurnal 2017, h. 8-9. <http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/equilibrium/article/viewFile/1268/1127>, di akses tanggal 9 mei 2019).

termasuk pemilik manusia dan seluruh sumber daya yang ada. Karena itu, Allah adalah pemilik hakiki. Manusia hanya diberi amanah untuk memiliki untuk sementara waktu, sebagai ujian bagi mereka. Dalam Islam, segala sesuatu yang ada tidak di ciptakan dengan sia-sia, tetapi memiliki tujuan. Tujuan di ciptakannya manusia adalah untuk beribadah kepada-Nya. Karena itu segala aktivitas manusia dalam hubungannya dengan alam dan sumber daya serta manusia (*mu'amalah*) di bingkai dengan kerangka hubungan dengan Allah. Karena kepada-Nya manusia akan mempertanggungjawabkan segala perbuatan, termasuk aktivitas ekonomi dan bisnis.³⁵

- 2) *'Adl* Allah adalah pencipta segala sesuatu, dan salah satu sifat-Nya adalah adil. Dia tidak membeda-bedakan perlakuan terhadap makhluk-Nya secara dzalim. Manusia sebagai khalifah di muka bumi harus memelihara hukum Allah di bumi dan menjamin bahwa pemakaian segala sumber daya di arahkan untuk kesejahteraan manusia, supaya semua mendapat manfaat daripadanya secara adil dan baik. Dalam banyak ayat, Allah memerintahkan manusia untuk berbuat adil. Islam mendefinisikan adil sebagai tidak menzalimi dan tidak di zalimi. *Implikasi* ekonomi dari nilai ini adalah bahwa pelaku ekonomi tidak di bolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain atau merusak alam. Tanpa keadilan, manusia akan terkotak-kotak dalam berbagai golongan. Golongan yang satu akan menzalimi golongan yang lain, sehingga terjadi *eksploitasi* manusia atas manusia. Masing-masing berusaha mendapatkan hasil yang lebih besar

³⁵ G Restianti, "Bab III Prinsip ekonomi dalam Islam", 2015, [http://repository.uin-suska.ac.id/6539/4/BAB III.pdf](http://repository.uin-suska.ac.id/6539/4/BAB%20III.pdf), diakses tanggal 01 Mei 2019).

daripada usaha yang di keluarkannya karena kerakusannya. Keadilan dalam hukum Islam berarti pula keseimbangan antara kewajiban yang harus di penuhi oleh manusia (*mukallaf*) dengan kemampuan manusia untuk menunaikan kewajiban itu. Di bidang usaha untuk meningkatkan ekonomi, keadilan merupakan "nafas" dalam menciptakan pemerataan dan kesejahteraan, karena itu harta jangan hanya saja beredar pada orang kaya, tetapi juga pada mereka yang membutuhkan.

- 3) *Nubuwwah* karena sifat *rahim* dan kebijaksanaan Allah, manusia tidak di biarkan begitu saja di dunia tanpa mendapat bimbingan. Karena itu diutuslah para Nabi dan Rasul untuk menyampaikan petunjuk dari Allah kepada manusia tentang bagaimana hidup yang baik dan benar di dunia, dan mengajarkan jalan untuk kembali (*taubat*) keasal-muasal segala sesuatu yaitu Allah. Fungsi Rasul adalah untuk menjadi model terbaik yang harus di teladani manusia agar mendapat keselamatan di dunia dan akhirat. Untuk umat Muslim, Allah telah mengirimkan manusia model yang terakhir dan sempurna untuk di teladani sampai akhir zaman, Nabi Muhammad Saw. Sifat-sifat utama sang model yang harus di teladani oleh manusia pada umumnya dan pelaku ekonomi serta bisnis pada khususnya adalah *Sidiq* (benar, jujur), *amanah* (tanggung jawab, dapat dipercaya, kredibilitas), *fathanah* (kecerdikan, kebijaksanaan, intelektualitas) dan *tabligh* (komunikasi keterbukaan dan pemasaran).³⁶

³⁶ *Ibid.*, h. 3.

4) *Khilafah* dalam Al-Qur'an Allah berfirman bahwa manusia di ciptakan untuk menjadi *khalifah* di bumi artinya untuk menjadi pemimpin dan pemakmur bumi. Karena itu pada dasarnya setiap manusia adalah pemimpin. Nilai ini mendasari prinsip kehidupan kolektif manusia dalam Islam (siapa memimpin siapa). Fungsi utamanya adalah untuk menjaga keteraturan interaksi antar kelompok termasuk dalam bidang ekonomi agar kekacauan dan keributan dapat di hilangkan, atau di kurangi. Dalam Islam pemerintah memainkan peranan yang kecil tetapi sangat penting dalam perekonomian. Peran utamanya adalah untuk menjamin perekonomian agar berjalan sesuai dengan syari'ah, dan untuk memastikan tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak manusia. Semua ini dalam kerangka mencapai tujuan-tujuan syari'ah untuk memajukan kesejahteraan manusia. Status khalifah atau pengembal amanat Allah itu berlaku umum bagi semua manusia, tidak ada hak istimewa bagi individu atau bangsa tertentu sejauh berkaitan dengan tugas kekhilafahan itu. Namun tidak berarti bahwa umat manusia selalu atau harus memiliki hak yang sama untuk mendapatkan keuntungan dari alam semesta itu. Mereka memiliki kesamaan hanya dalam hal kesempatan, dan setiap individu bisa mendapatkan keuntungan itu sesuai dengan kemampuannya. Individu-individu diciptakan oleh Allah dengan kemampuan yang berbeda-beda sehingga mereka di perintah untuk hidup bersama, bekerja bersama, dan saling memaatkan keterampilan mereka masing-masing.³⁷

³⁷ Ibid., h. 4.

5) *Ma'ad* walaupun seringkali di terjemahkan sebagai kebangkitan tetapi secara harfiah *ma'ad* berarti kembali. Dan kita semua akan kembali kepada Allah. Hidup manusia bukan hanya di dunia, tetapi terus berlanjut hingga alam akhirat. Pandangan yang khas dari seorang Muslim tentang dunia dan akhirat dapat dirumuskan sebagai: "*Dunia adalah ladang akhirat*". Artinya dunia adalah wahana bagi manusia untuk bekerja dan beraktivitas (beramal shaleh), namun demikian akhirat lebih baik daripada dunia. Perbedaan tidak bisa diterapkan berdasarkan warna kulit, ras, kebangsaan, agama, jenis kelamin atau umur. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban ekonomi setiap individu disesuaikan dengan kemampuan yang di milikinya dan dengan peranan-peranan normatif masing-masing dalam struktur sosial. Kapan saja ada perbedaan-perbedaan seperti ini, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka harus di atur sedemikian rupa, sehingga tercipta keseimbangan. Islam tidak mengakui adanya kelas-kelas sosio-ekonomik sebagai sesuatu yang bertentangan dengan prinsip persamaan maupun dengan prinsip persaudaraan (*ukhuwah*). Kekuatan ekonomi berbeda dengan kekuatan sosiopolitik, karena adanya fakta bahwa tujuan-tujuan besar dan banyak rinciannya di tekankan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Al-Qur'an mengemukakan kepada Nabi dengan mengatakan: "*Dan katakanlah (Muhammad kepada umat Muslim): 'Bekerjalah.'*" Nabi juga telah melarang kaumnya mengemis kecuali dalam keadaan kelaparan. Ibadah yang paling baik adalah bekerja, dan pada saat yang sama bekerja merupakan hak dan kewajiban. kewajiban masyarakat dan badan yang mewakilinya adalah menyediakan kesempatan-kesempatan kerja

kepada para individu. Buruh yang bekerja secara manual layak mendapatkan pujian sebagaimana di riwayatkan Nabi SAW. Pernah memohon kepada Allah SWT.³⁸ Untuk melindungi diri agar beliau, antara lain, tidak terjangkit penyakit lemah dan malas. Nabi Saw pernah menyuruh seorang penggalian kubur untuk memperbaiki lubang yang dangkal di suatu kuburan meskipun hanya permukaannya saja. Beliau menetapkan aturan bahwa "Allah menyukai orang yang bila dia melakukan suatu pekerjaan, maka ia harus melakukannya dengan cara yang sangat baik."³⁹

C. Pemberdayaan Masyarakat Dekranasda (Dewan Kerajinan Nasional Daerah)

1. Pengertian Dekranasda

Kerajinan sebagai suatu perwujudan perpaduan ketrampilan untuk menciptakan suatu karya dan nilai keindahan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu kebudayaan. Kerajinan tersebut tumbuh melalui proses waktu berabad-abad. Tumbuh kembang maupun laju dan merananya kerajinan sebagai warisan yang turun temurun tergantung dari beberapa faktor. Di antara faktor-faktor yang berpengaruh adalah transformasi masyarakat yang di sebabkan oleh teknologi yang semakin modern, minat dan penghargaan masyarakat terhadap barang kerajinan dan tetap mumpuninya para perajin itu sendiri, baik dalam menjaga mutu dan kreativitas maupun dalam penyediaan produk kerajinan secara berkelanjutan.

³⁸ Ibid., h. 5.

³⁹ Ibid., h. 6.

Dengan di sadarnya peranan dan arti penting dari keberadaan "industri" kerajinan sebagai suatu wahana pemerataan pendapatan, penciptaan usaha baru serta upaya pelestarian hasil budaya bangsa, maka celah-celah keberadaannya mulai tersimak dan menggugah tokoh-tokoh masyarakat dari berbagai kalangan, utamanya mereka yang erat kaitannya dengan seni budaya kerajinan itu sendiri, seperti para pecinta/peminat barang-barang seni dan kerajinan, tokoh masyarakat dan para seniman serta para ahli yang menggeluti bidang seni serta kerajinan.

Di landasi kesadaran akan kelangsungan hidup dari kerajinan yang menopang kehidupan berjuta-juta keluarga yang di hadapkan pada kemajuan teknologi industri di satu sisi dan pelestarian nilai budaya bangsa yang harus tercermin dalam produk kerajinan, maka di pandang perlu adanya wadah partisipasi masyarakat bertaraf nasional yang berfungsi membantu dan sebagai mitra pemerintah dalam membina dan mengembangkan kerajinan. Itulah latar belakang berdirinya Dewan Kerajinan Nasional yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bersama 2 Menteri, yaitu Menteri Perindustrian dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nomor: 85/M/SK/3/1980 dan Nomor: 072b/P/1980, tanggal 3 Maret 1980 di Jakarta.

Untuk mendukung kelancaran kegiatannya di tingkat daerah, dengan di payungi Surat menteri Dalam Negeri Nomor: 537/5038/Sospol, tanggal 15 Desember 1981, di bentuklah organisasi Dekranas tingkat daerah (Dekranasda). Kepengurusan Dekranasda di kukuhkan oleh Ketua Umum Dekranas atas usulan daerah.

Dari sejak berdirinya, perjalanan Dekranas sudah cukup panjang dan sudah 5 periode masa bakti kepengurusan. Adapun kepengurusan Dekranas masa bakti tahun 2004-2009, sesuai amanat Munas Dekranas tanggal 18 April 2005, adalah berdasarkan Surat Keputusan Bersama 6 Menteri, yaitu: Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, Menteri Negara Koperasi dan UKM, serta Menteri Negara BUMN, dan mengalami perubahan yang di tetapkan pada tanggal 27 April 2005.⁴⁰

Dekranasda Merupakan Singkatan Dari Dewan Kerajinan Nasional Daerah. Berdasarkan Perlindungan Perempuan Qanun Aceh Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Pemberdayaan Dan Bab II Asas Dan Tujuan Pasal 2 Pemberdayaan dan perlindungan perempuan di laksanakan berdasarkan asas :

- a. Penghargaan terhadap nilai-nilai syariat Islam dan adat Aceh
- b. Kepastian hukum
- c. Kepentingan umum
- d. Tertib penyelenggaraan pemerintahan
- e. Penghormatan atas hak asasi manusia
- f. Keadilan dan kesetaraan gender
- g. Profesionalitas, akuntabilitas dan transparansi
- h. Non diskriminasi
- i. Perlindungan dan pemenuhan hak korban.⁴¹

Pasal 3 Pemberdayaan dan perlindungan perempuan mempunyai tujuan:

⁴⁰ Wikipedia, https://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Kerajinan_Nasional, diakses tanggal 23 februari 2019.

⁴¹ Qanun Provinsi Aceh Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Pemberdayaan Dan Perlindungan Perempuan.

- a. Meningkatkan partisipasi perempuan dalam proses pembangunan
- b. Meningkatkan kualitas hidup perempuan agar mampu berperan seimbang dengan laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan yang relevan
- c. Memberikan jaminan kepada perempuan untuk dapat memenuhi hak-haknya sebagai manusia dalam segala aspek kehidupan
- d. Memberikan rasa aman kepada perempuan dalam segala aspek kehidupan.

BAB III Ruang Lingkup Pasal 4 (1) Kegiatan pemberdayaan dan perlindungan perempuan di lakukan dan di koordinasikan oleh Satuan Kerja Perangkat Aceh atau Kabupaten/Kota yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pemberdayaan dan perlindungan perempuan. (2) Koordinasi sebagaimana di maksud pada ayat (1) di laksanakan bersama instansi, dinas, lembaga dan organisasi masyarakat yang terkait dengan pemberdayaan dan perlindungan perempuan. Pasal 5 (1) Untuk pelaksanaan pemberdayaan dan perlindungan perempuan, perencanaan dan pengawasan di sediakan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota (APBK). (2) Seluruh anggaran untuk pemberdayaan dan perlindungan perempuan di koordinasikan oleh Satuan Kerja Perangkat Aceh atau Kabupaten/Kota yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pemberdayaan dan perlindungan perempuan.⁴²

2. Tujuan Berdirinya Dekranasda

Dekranasda mempunyai tujuan, yaitu:

- 1) Menggali, mengembangkan dan melestarikan warisan budaya bangsa serta membina penemuan dan penggunaan teknologi baru untuk meningkatkan kualitas dalam rangka memperkuat jati diri budaya bangsa.
- 2) Menanamkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya seni kerajinan bagi kehidupan sehari-hari warga negara Indonesia yang bisa meningkatkan martabat manusia.
- 3) Memperhatikan dan memperjuangkan kepentingan perajin dan peminat dengan mendorong semangat kewiraswastaan mereka.
- 4) Membantu pemerintah merumuskan kebijaksanaan di bidang industri kerajinan dan program peningkatan kualitas sumber daya manusia.
- 5) Memperluas pangsa pasar hasil kerajinan.⁴²

Dekranasda Kabupaten Aceh Utara dalam melaksanakan program dan kegiatannya mendorong peningkatan harkat, martabat dan kesejahteraan para perajin serta menjembatani komunikasi dengan pemerintah dan seluruh mitra kerja perajin yang ada di Kabupaten Aceh Utara. Untuk itu, Dekranasda Kabupaten Aceh Utara akan senantiasa berupaya optimal melakukan pembenahan dan perbaikan, serta pembinaan, peningkatan, pengembangan dan memotivasi terhadap para pelaku usaha produk unggulan lokal di Kabupaten Aceh Utara, disertai pemberian bantuan modal usaha, bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Aceh Utara, pihak perbankan dan lainnya

⁴² Wikipedia, https://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Kerajinan_Nasional, diakses tanggal 23 februari 2019.

Pembinaan industri kerajinan yang dilakukan oleh Dekranasda Kabupaten Aceh Utara, di Gampong Ulee Madon pemberdayaan yang dilakukan berdasarkan bagaimana kerajinan yang sudah ada di Gampong itu sendiri, banyak perempuan yang di berdayakan oleh Dekranasda dengan berbagai bidang, berlandaskan kepada nilai budaya Daerah, nilai Khasanah Warisan Budaya, nilai ekonomis produk kerajinan serta bahan baku yang ramah lingkungan, melalui pengembangan kerajinan berbasis budaya, inovasi dan teknologi yang sejalan dengan kebijakan pemerintah daerah dalam pengembangan ekonomi kreatif.

Untuk memajukan para perajin di Aceh umumnya dan dalam rangka mengembangkan usahanya maka perlu adanya koordinasi dan kerjasama yang baik dalam pembinaanya, antara Dekranasda Provinsi, kabupaten/kota serta Instansi terkait dan BUMN serta pihak ketiga lainnya sehingga kerajinan Aceh pada umumnya dan Aceh Utara pada khususnya dapat bersaing dan bersanding dengan produksi daerah lain.

Agar setiap produk kerajinan kabupaten/kota dalam Provinsi Aceh baik yang berupa produk unggulan maupun bukan agar dapat dipatenkan, selanjutnya dikembangkan melalui pelaksanaan pelatihan yang dilaksanakan pembinaannya oleh Dekranasda Propinsi.⁴³

⁴³ Wikipedia, https://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Kerajinan_Nasional, diakses tanggal 6 September 2019.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Model dan Jenis Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat di mana penelitian di laksanakan. Adapun lokasi penelitian ini adalah pada Dekranasda Kabupaten Aceh Utara di Lhokseumawe kantor Dinas Dekranasda di Kota Lhokseumawe yang di kelola oleh Ibu Bupati sendiri, dan tempat penelitian untuk melakukan wawancara lebih mendetail yaitu di Ulee Madon. Alasan pemilihan tempat dan lokasi penelitian, dari segi transpor memudahkan peneliti untuk menjangkau lokasi tersebut karena lokasi penelitin dengan rumah peneliti mudah dan dekat untuk di jangkau, dari segi data memudahkan peneliti untuk mendapatkan data dari Lembaga karena peneliti mengenal beberapa pengurus di Ulee Madon, sedangkan dari segi data memudahkan peneliti karena jarak tempuh yang tidak terlalu jauh tidak memerlukan banyak dana hingga sampai ke lokasi penelitian.

B. Jenis dan pendekatan penelitian

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian *field research* (penelitian lapangan) yaitu mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang interaksi lingkungan sesuatu unit sosial, individual kelompok, lembaga dan masyarakat, dengan berkunjung langsung ke Dekranasda Kabupaten Aceh Utara yang bertempat di Kota Lhokseumawe, dan di Ulee Madon, untuk mendapatkan informasi berkenaan dengan permasalahan yang akan di teliti lebih lanjut.

Sedangkan pendekatan penelitian yang peneliti gunakan adalah pendekatan penelitian kualitatif. Menurut Damyyon karakteristik penelitian kualitatif yaitu berfokus pada kata bukan angka, peneliti terlibat dekat dengan hal-hal yang diteliti, menjelaskan dan memaparkan secara terperinci, fokus yang holistik, artinya peneliti tidak hanya terpaku pada satu dua variabel, tetapi lebih luas cakupannya, fleksibel, tidak hanya meneliti topik, tetapi juga menyelidiki hal baru yang diungkapkan informan tentang pemahaman mereka, proses, menangkap proses yang berlangsung dari waktu ke waktu induktif ke induktif, mendapatkan gagasan dari hasil mengumpulkan dan meneliti data.⁴⁴

C. Sumber Data

Sumber data penelitian adalah subyek di mana data dapat diperoleh. Berdasarkan sumber pengambilannya, dapat dibedakan sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang peneliti peroleh secara langsung dari narasumber asli dengan melakukan wawancara. Untuk memperoleh data tersebut peneliti merupakan metode wawancara dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah disediakan. Data primer yang dimaksud dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Pengurus Dekranasda, Pengurus Kerajinan di Ulee Madon, dan Pengrajin Tas Motif Aceh data yang peneliti peroleh dijadikan sebagai data pokok dalam menjelaskan permasalahan dalam penelitian ini.

⁴⁴ Cholid narbuko, Abu Acyadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta Bumi Akara, 2001), h. 46.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah jenis data yang di peroleh dan di gali melalui hasil penelitian lapangan merupakan data kualitatif. Jenis data ini sering juga di sebut data tambahan.⁴⁵ Biasanya di katakan sebagai data pendukung karena data tersebut telah di sajikan oleh pihak lain.

D. Tehnik pengumpulan data

Data adalah bahan atau keterangan tentang suatu obyek penelitian di peroleh di lokasi penelitian, Pengumpulan data yang di butuhkan dalam penelitian ini di peroleh dengan cara sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan langsung yang meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indera. Observasi yang di lakukan dalam penelitian ini adalah observasi tak berstruktur. Di karenakan penelitian ini bersifat kualitatif maka fokus observasi akan berkembang selama kegiatan observasi berlangsung. Observasi dalam penelitian ini di lakukan dengan mengamati kegiatan pelaksanaan pelatihan di Gampong Ulee Madon.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud, percakapan iu di lakukan oleh dua pihak, yaitu wawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan berwawancara (*interviewee*) yang meberikan jawaban atas pertanyaan itu.

⁴⁵ Sanapiah Faisal, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), h. 27.

Peneliti bertindak sebagai pewawancara kepada yang mendapatkan pemberdayaan dari Program Dekranasda sebagai yang terwawancarai.

Wawancara yang di gunakan peneliti untuk menggumpulkan data adalah wawancara terstruktur karena peneliti menggunakan pedoman wawancara yang di susun secara sistematis dan lengkap untuk menggumpulkan data yang di cari. Wawancara pada penelitian ini di lakukan pada pengurus Dekranasda, pemilik dari pembuatan Tas Motif Aceh Putroena Souvenir, dan pengrajin atau masyarakat yang ikut pembuatan Tas Motif Aceh di Ulee Madon. Wawancara merupakan suatu kegiatan yang di lakukan langsung oleh peneliti dan mengharuskan antara peneliti serta narasumber bertatap muka sehingga dapat melakukan tanya jawab secara langsung dengan menggunakan pedoman wawancara.

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi di peroleh melalui dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Dekranasda dan prosedur pelatihan dari Dekranasda berupa gambar, foto, brosur atau dokumen lainnya. Hal ini bertujuan untuk memuat dan mencatat sejumlah informasi yang menyangkut dengan permasalahan yang diteliti.

E. Teknik Analisis Data

Setelah berbagai data terkumpul, maka untuk menganalisis data menggunakan teknik deskriptif analisis yaitu teknik menggambarkan atau menjelaskan data yang di peroleh di lapangan, kemudian menganalisis data

dengan berpedoman pada model dari Miles dan Huberman, di mana dalam menjelaskan analisis data mempunyai tiga tahap:

1. Mereduksi data

Mereduksi data adalah proses yang meliputi kegiatan menyeleksi, memfokuskan, dan menyederhanakan semua data yang di peroleh mulai dari awal pengumpulan data sampai penyusunan laporan penelitian.⁴⁶ Hal ini di lakukan dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang jelas dari data tersebut, sehingga peneliti dapat membuat kesimpulan yang dapat di pertanggung jawabkan tentang Pola Pemberdayaan Perempuan Melalui Program peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Oleh Dekranasda di Tinjau Menurut Perspektif Ekonomi Islam.

2. Penyajian Data

Penyajian data di lakukan dalam rangka mengorganisasikan hasil reduksi dengan cara menyusun secara naratif sekumpulan informasi yang telah di peroleh dari hasil reduksi. Hal ini di harapkan dapat memberikan gambaran kemungkinan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Informasi yang di lakukan di sini adalah uraian proses yang berhubungan dan membandingkan data yang di peroleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang ada tentang Pola Pemberdayaan Perempuan Melalui Program peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Oleh Dekranasda di Tinjau Menurut Perspektif Ekonomi Islam.

3. Penarikan kesimpulan (Verifikasi)

⁴⁶ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung, Alfabeta, 2006), h. 246.

Penarikan kesimpulan adalah proses pemberian makna terhadap hasil penafsiran dan evaluasi data yang di sajikan, dan hasil akhir dari proses analisis data yang di lakukan penarikan kesimpulan dari keseluruhan tentang Pola Pemberdayaan Perempuan Melalui Program peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Oleh Dekranasda Ditinjau Menurut Perspektif Ekonomi Islam

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Berdirinya Dekranasda Kabupaten Aceh Utara

Dekranasda merupakan instrument pemberdayaan ekonomi Nasional dengan berbagai jenis potensi masyarakat miliki. Potensi ini bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi warga gampong Ulee Madon salah satunya melalui kerajinan hasil daerah pembangunan usaha ekonomi mereka. Keberadaan Dekranasda juga memberikan jasa sumbangan bagi peningkatan sumber pendapatan asli Ulee Madon yang memungkinkan gampong mampu melaksanakan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar secara optimal.

Lembaga ini bernama Dekranasda yaitu Dewan Kerajinan Nasional Daerah Di Kabupaten Aceh Utara di dirikan pada tanggal tahun 2013, lokasi Dekranasda Kabupaten Aceh Utara Lhokseumawe Gampung Lancang Garam Kecamatan Banda Sakti Kabupaten Aceh Utara Wilayah Kerja Dekranasda, Dekranasda Kabupaten Aceh Utara salahnya adalah di Gampong Ulee Madon. Pembentukan Dekranasda untuk mendirikan badan usaha yang bergerak mempertahankan keaslian budaya daerah sesuai dengan daerah masing-masing hal tersebut sangat membanggakan menggembirakan semua pihak. Pengembangan kreatifitas perajin upaya dalam meningkatkan nilai ekonomi masyarakat.

2. Visi dan Misi Dekranasda Kabupaten Aceh Utara

a. Visi

Mewujudkan Dekranasda Kabupaten Aceh Utara sebagai wadah pembinaan dan pengembangan produk kerajinan yang berkualitas sebagai ikon Kabupaten Aceh Utara yang memiliki daya saing tinggi.

b. Misi

- 1) Meningkatkan sumber daya manusia perpengrajin yang unggul, mengungguli, melestarikan serta mengembangkan warisan tradisi dan budaya daerah.
- 2) Meningkatkan diversifikasi produk kerajinan berbasis kearifan lokal dengan selera global melalui pengembangan industri, kreatifitas dan efisien.
- 3) Membangun kelompok-kelompok usaha industri kerajinan profesional.
- 4) Memperluas jaringan pemasaran produk kerajinan Kabupaten Aceh Utara baik dalam dan luar negeri melalui promosi.

Berdasarkan hasil wawancara yang di peroleh dari Sekretaris Dekranasda yaitu Ibu Mulyani mengatakan bahwa:

“Dalam melaksanakan program dalam menjalankan operasionalnya, dana yang dipakai yaitu dari APBD Aceh Utara, dalam menjalankan program saya bersama pengurus lainnya membagi dana untuk program tersebut berdasarkan keperluan dari gampong kerajinan tersebut, adapun dana tersebut kami tidak memberikan dalam bentuk modal atau bentuk uang,

melainkan kami menjalankan program sesuai dari daya gampong itu sendiri.”¹

B. Pemberdayaan Perempuan Melalui Program Dekranasda di Gampong Ulee Madon Tas Motif Aceh Putroena Souvenir

Program dari Dekranasda pada hakikatnya sama dengan rencana yang cermat dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM) di dalam suatu organisasi atau lembaga. Artinya pemberdayaan ini adalah perubahan yang memperbaiki masa depan menuju ke arah yang lebih baik. Pemberdayaan lebih mengarah pada kemandirian seseorang mengambil keputusan untuk membenah diri berpartisipasi dalam penggerak perubahan dari masyarakat.

Seperti pemberdayaan yang lain, dalam pemberdayaan masyarakat oleh Dekranasda di Gampong Ulee Madon Putroena Souvenir melalui sebuah program yang amat cermat untuk dapat menciptakan masyarakat yang mampu terberdaya. Dimana dapat kita lihat banyak sekali sumber daya alam yang dapat kita gunakan semaksimal mungkin dan dari hal tersebut kita perlukan adanya pembenahan dari Sumber daya manusia yaitu masyarakat yang inisiatif merubah pola kehidupan untuk dapat mandiri secara finansial.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dari Sekretaris Dekranasda yaitu Ibu Mulyani mengatakan bahwa

“Sekarang banyak yang perlu kita benah guna mencapai ekonomi yang dapat menunjang kemandirian keuangan dalam masyarakat, salah satunya dengan cara memberdayakan, kita membenah mereka untuk memajukan

¹ Hasil wawancara dengan Ibu Mulyani selaku Sekretaris Dekranasda Kabupaten Aceh Utara, pada pukul 09.50 tanggal 27 Mei 2019.

melainkan kami menjalankan program sesuai dari daya gampong itu sendiri.”¹

B. Pemberdayaan Perempuan Melalui Program Dekranasda di Gampong Ulee Madon Tas Motif Aceh Putroena Souvenir

Program dari Dekranasda pada hakikatnya sama dengan rencana yang cermat dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM) di dalam suatu organisasi atau lembaga. Artinya pemberdayaan ini adalah perubahan yang memperbaiki masa depan menuju ke arah yang lebih baik. Pemberdayaan lebih mengarah pada kemandirian seseorang mengambil keputusan untuk membenah diri berpartisipasi dalam penggerak perubahan dari masyarakat.

Seperti pemberdayaan yang lain, dalam pemberdayaan masyarakat oleh Dekranasda di Gampong Ulee Madon Putroena Souvenir melalui sebuah program yang amat cermat untuk dapat menciptakan masyarakat yang mampu terberdaya. Dimana dapat kita lihat banyak sekali sumber daya alam yang dapat kita gunakan semaksimal mungkin dan dari hal tersebut kita perlukan adanya pembenahan dari Sumber daya manusia yaitu masyarakat yang inisiatif merubah pola kehidupan untuk dapat mandiri secara finansial.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dari Sekretaris Dekranasda yaitu Ibu Mulyani mengatakan bahwa

“Sekarang banyak yang perlu kita benah guna mencapai ekonomi yang dapat menunjang kemandirian keuangan dalam masyarakat, salah satunya dengan cara memberdayakan, kita membenah mereka untuk memajukan

¹ Hasil wawancara dengan Ibu Mulyani selaku Sekretaris Dekranasda Kabupaten Aceh Utara, pada pukul 09.50 tanggal 27 Mei 2019.

kehidupan yang layak kepada mereka. Walaupun memang betul lapangan kerja sangat minim yang tersedia. Maka dari itu dengan adanya program tersebut kita mampu membangkitkan kerajinan, meningkatkan potensi, mutu skill, kreatif mereka perlu kita berikan penyuluhan-penyuluhan untuk memberikan semangat dan membuka wawasan luas kepada pengrajin.² Tujuan dari program ini untuk memberdayakan masyarakat perlu juga dengan adanya inisiatif masyarakat dalam bertindak mengambil langkah. Program tersebut di mana langkah-langkah yang di lakukan pemerintah dalam memberdayakan masyarakat dengan memberikan penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat atau para pengrajin. Kemudian pemerintah juga melakukan atau melaksanakan pelatihan sesuai permintaan pasar yang sesuai keahlian atau keterampilan yang di miliki oleh para pengrajin.

Berdasarkan hasil wawancara yang di peroleh dari Sekretaris Dekranasda yaitu Ibu Mulyani mengatakan bahwa:

“Untuk mencapai sesuai target yang kami buat, dalam memberdayakan perempuan perlu adanya upaya dukungan dari pemerintah daan juga dukungan dari masyarakat, dan juga kami menyiapkan berbagai program pendukung seperti pelatihan pengrajin, pembinaan pengrajin, penilaian desa kerjina, Rakerda. Rakernas, expo, pameran-pameran baik dalam daerah maupun luar daerah berupa program peningkatan kemampuan teknologi industri untuk meningkatkan minat masyarakat sehingga dapat menyejahterakan masyarakat dalam kehidupan sehari-harinya. Yang terpenting harapan kami dapat membantu, saling kerjasama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.”³

² Hasil wawancara dengan Ibu Mulyani selaku Sekretaris Dekranasda Kabupaten Aceh Utara, pada pukul 09.50 tanggal 27 Mei 2019.

³ Hasil wawancara dengan Ibu Mulyani selaku Sekretaris Dekranasda Kabupaten Aceh Utara, pada pukul 09.50 tanggal 27 Mei 2019.

Pemberdayaan yang di lakukan Dekranasda terhadap program Pemberdayaan kemampuan teknologi Industri di Ulee Madon pada Putroena Souvenir, adalah sebagai berikut:

1. Program Bidang Pengembangan Usaha Dan Bidang Pengembangan Produk
 - a. Bidang pengembangan Usaha

Cara yang dapat di lakukan untuk memberdayakan masyarakat yaitu dengan pembinaan dan pelatihan wirausahaan bagi pengrajin dan pengembangan pelatihan wirausahaan dan menilai Gampong Kerajinan. Dengan membantu pengrajin agar mudah mengakses lembaga keuangan dan perbankan untuk menambah modal guna dapat mengembangkan usaha, membentuk jaringan bisnis kerajinan, memanfaatkan fasilitas IT untuk pengembangan manajemen usaha kerajinan, membina dan mengembangkan usaha gampong kerajinan, memotivasi para pengrajin untuk memanfaatkan sumber daya alam setempat guna dikembangkan menjadi *handicraft*. Membina kelompok pengrajin untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi perdagangan bebas.

Namun, berdasarkan hasil wawancara yang di peroleh dari Sekretaris Dekranasda yaitu Ibu Maryana mengatakan bahwa:

Pelatihan, penyuluhan menurut ibu Maryana pemilik dari Putroena Souvenir mengatakan: "Pemerintah atau Pengurus Dekranasda belum begitu aktif dalam mengadakan pelatihan, penyuluhan."⁴

⁴ Hasil wawancara dengan Ibu Mulyani selaku Sekretaris Dekranasda Kabupaten Aceh Utara, pada pukul 09.50 tanggal 27 Mei 2019.

b. Bidang pengembangan Produk

Dalam pengembangan produk pihak Dekranasda melakukan peningkatan mutu produk melalui pelatihan "*diversifikasi, finishing dan Desain*" dari hasil kerajinan yang dihasilkan, bekerjasama dengan instansi terkait, mendorong para pengrajin melakukan ketahanan produk dari hasil kerajinan, juga menetapkan kelompok kerajinan yang ditunjuk sebagai model bagi Kab/Kota, dengan memberikan juga ide-ide bagaimana desain yang diminati pasar sekarang ini, baik dari warna ataupun dari bentuk, membuat kompetisi 2 tahun sekali, menyusun standar penilaian, menginventarisir produk produk kerajinan yang ada di daerah untuk dikembangkan menjadi produk unggulan, dilain kesempatan juga mempromosikan produk kerajinan unggulan pada setiap acara atau kesempatan pada *event-event* kegiatan daerah.

2. Bidang Kerjasama Antar Lembaga Dan Pendanaan Bidang Program

a. Bidang kerjasama antar lembaga

Dalam melakukan pemberdayaan lebih luas dan lebih dikenal oleh instansi, masyarakat dan berbagai pihak lainnya. Ada beberapa cara yang dilakukan yaitu dengan kerjasama dengan instansi lainnya dalam rangka pengembangan kerajinan, baik pihak bank atau nonbank, pemberdayaan juga dilakukan salah satunya dengan acara *Craft Expo* di Aceh berkoordinasi dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh serta instansi yang terkait.

b. Bidang Program

Pemberdayaan Dekranasda juga memfasilitasi kerajinan dari Kab/Kota untuk mendapatkan sertifikat HAKI, setiap tahunan program selalu

berkomitmen untuk melestarikan dan mengembangkan kerajinan daerah, dan juga mengupdate selalu database pengrajin setiap tahunnya, melakukan juga berbagai pertemuan dengan DPR setempat guna mendapatkan dukungan, untuk meningkatkan wawasan selalu diadakan kegiatan pelatihan manajemen, dan adapun untuk meningkatkan SDM pengrajin juga dilakukan berupa pelatihan/magang keluar daerah.

3. Bidang promosi dan pemasaran dan bidang humas dan publikasi

a. Bidang promosi dan pemasaran

Dalam melaksanakan program dalam bidang promosi dan pemasaran terdapat beberapa kegiatan yang dirancang yaitu dengan menyebarluaskan selebaran atau brosur memasang baliho, mengikuti *event-event* promosi baik di dalam dan luar negeri bekerjasama dengan pihak terkait, pemerintah juga membuat *website* untuk promosi pemasaran produk hasil kerajinan, seluruh Dekranasda Kab/Kota harus membuat papan nama di gampong agar masyarakat luar mengetahui kerajinan gampong tersebut, adapun pemasaran yang dilakukan yaitu menitipkan sampel di *otulet/showroom* di pusat kerajinan Aceh dan mengusahakan kerjasama dengan *travel-travel* sehingga para tamu yang berkunjung dapat berkunjung di Gampong-gampong kerajinan.

b. Bidang humas dan publikasi

Bidang humas dan publikasi bertujuan membuat leaflet, booklet, baliho, catalog dan buku buku yang menginformasikan produk kerajinan di setiap daerah, kegiatan promosi dengan memanfaatkan website Dekranasda Aceh

dan Kab/Kota guna mempromosikan program, kegiatan, *event*, data dan lain-lain.

“Menurut informasi yang peneliti dapatkan melalui hasil wawancara Kegiatan yang dilakukan selaku pengurus Dekranasda dalam pemberdayaan masyarakat atau perempuan Kabupaten Aceh Utara terkhusus seperti di Gampong Ule Madon Putroena Souvenir seperti kegiatan pembinaan, dan pelatihan menjahit, bordir dan sebagainya, kami lebih aktif dalam bidang promosi dikarenakan memang gampong tersebut sudah ada kerajinan turun temurun dari generasi sebelumnya.”⁵

Adapun berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik kerajinan Tas Motif Aceh dengan nama usaha Putroena Souvenir mengatakan bahwa:

“Dalam hasil bergabung dengan Dekranasda saat ini masih belum ada hasil yang sangat signifikan, di karenakan tidak adanya teratur dalam menjalankan program secara rutin, hanya terkadang sesekali adanya penyuluhan yang di lakukan, jadi kalau yang saya dapatkan belum terlalu maksimal hasilnya. Terkadang mereka mendatangkan beberapa ibu pejabat atau orang lembaga resmi memperkenalkan hasil kerajinan kami baik yang dari Jakarta atau pejabat daerah ini. Dari sinilah kerajinan kami lebih terkenal di masyarakat luas baik di daerah maupun di luar daerah, seperti Amerika, Arab Saudi, Singapura, Malaysia.”⁶

Pemberdayaan perempuan yang dilakukan di Gampong Ulee Madon Putroena Souvenir telah terjadi bergabung selama kurang lebih 3 tahun. Sebelumnya di Ulee Madon Putroena Souvenir ini telah mengembangkan usaha kerajinan Motif Aceh dari tahun 2004 setelah terjadinya bencana *Tsunami* di Aceh. Masyarakat menyambut baik dalam bergabung mengikuti pelatihan Tas

⁵ Hasil wawancara dengan Ibu Mulyani selaku Sekretaris Dekranasda Kabupaten Aceh Utara pada tanggal pukul 09.50 WIB 27 Mei 2019.

⁶ Hasil wawancara dengan Ibu Maryana selaku pemilik Kerajinan Tas Motif Aceh Putroena souvenir Ulee Madon pukul 10.34 WIB tanggal 4 Juni 2019.

Motif Aceh, mulai dari membordir, menjahit tas dan sama-sama mengeluarkan ide mendesain bentuk tas di Putroena Souvenir mempunyai pengrajin kurang lebih 65 orang, diantaranya 8 orang laki-laki, 57 orang perempuan dalam pembuatan tas perempuan dan ibu-ibu hanya membordir tas sesuai keinginan dari pasar, sesuai dari pesanan orang.

Kerajinan yang di rintis ini bermula dari generasi pertama dari Abang Sanusi, generasi kedua yaitu Ibu Maryana. Kerajinan Tas Motif Aceh ini mampu untuk membangkitkan ekonomi, menumbuh lagi semangat hidup warga sekitar, terutama untuk perempuan atau ibu-ibu janda setelah kehilangan suaminya, banyak sekali yang tidak tahu bagaimana mencari uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, dan juga banyak anak-anak yang terputus sekolahnya di karenakan ekonomi yang sangat dibawah rata-rata pendapatan.”⁷

Melihat hasil respon dari responden yang peneliti bagi untuk pengrajin Ulee Madon di Putroena Souvenir yang memiliki 65 orang pengrajin maka dapat di tarik kesimpulan bahwa setelah adanya pemberdayaan yang di lakukan Dekranasda Terhadap Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri di Gampong Ulee Madon pada Putroena Souvenir bahwasanya tingkat membantu dari programnya ini memang sudah membantu di mana ketika hadirnya program ini di Putroena Souvenir sudah ada dampak positif yang terlihat walaupun belum dikatakan maksimal, namun untuk kesejahteraan sudah dirasakan oleh masyarakat yang terberdayakan walaupun ada 10 orang 65 pengrajin lainnya masih berada pada taraf hidup yang kurang sejahtera, akan tetapi dari hasil program

⁷ Hasil wawancara dengan Ibu Maryana selaku pemilik Kerajinan Tas Motif Aceh Putroena Souvenir Ulee Madon 11.00 WIB tanggal 04 Juni 2019.

Dekranasda dalam melakukan promosi sudah baik contohnya saja dari hasil produksi banyak yang melakukan pemesanan baik di dalam daerah maupun diluar daerah dan juga sudah ke luar negeri.

Menurut informasi yang peneliti dapatkan melalui hasil wawancara dengan Ibu Aina merupakan salah satu masyarakat yang menjadi pengrajin di Putroena Souvenir bahwa:

“Setelah bekerja di Putroena Souvenir memang ada perubahan yang dirasakan dengan penghasilan yang ia dapatkan ia mampu membantu suaminya juga dalam memenuhi kehidupannya, dia mampu juga dalam menyekolahkan anak-anaknya, walaupun belum semua kebutuhan mampu dia penuhi tapi setidaknya dari sini saya mampu memberikan yang terbaik dalam membantu suami ujanya. Tapi sayang pemerintah kita untuk sosialisasinya masih sangat kurang, tidak begitu peduli padahal jika pemerintah sangat mendukung tentu bisa menjadi peluang ekonomi yang sangat bagus.”⁸

“hal yang sama juga dikatakan oleh Rukqiyah ia merupakan salah satu pengrajin Tas Motif Aceh dimana sebelumnya sempat membuka usaha di pinggir pantai namun tidak mampu memenuhi kebutuhan keluarga, malahan menambah utang, beliau mengatakan bahwa untuk bergabung bersama di Ulee Madon Putroena Souvenir setidaknya ada perubahan dia mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari, namun sepengetahuannya Dekranasda biasa saja dalam membantu perekonomian masyarakat, ia mengatakan sangat jarang sekali mereka mengadakan penyuluhan, sosialisasi pemerintah saja sangat jarang.”⁹

Secara teknis pemberdayaan yang dilakukan Dekranasda terhadap Program peningkatan kemampuan teknologi di Gampong Ulee madon pada Putroena

⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Aina selaku pekerja Kerajinan Tas Motif Aceh Putroena Souvenir Ulee Madon 15.00 WIB tanggal 10 Juni 2019.

⁹ Hasil wawancara dengan Ibu Rukiyah selaku pekerja Kerajinan Tas Motif Aceh Putroena Souvenir Ulee Madon 10.00 WIB tanggal 10 Juni 2019.

Souvenir dijalankan dengan tujuan memakmurkan, menyejahterakan pengrajin. Namun dalam pemberdayaannya di lapangan berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Ibu Maryana ia merupakan pemilik Putroena Souvenir mengatakan bahwa:

“ Ia memang merasakan adanya perubahan tapi masih dikategorikan belum ada bantuan yang begitu berubah dalam kerajinannya, akan tetapi Dekranasda hanya memberikan jalan pemasaran lebih luas, seperti memperkenalkan hasil produknya ke kalangan menengah atas (Pejabat).”¹⁰ Berdasarkan hasil penelitian mengenai Pola Pemberdayaan Perempuan

Melalui Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Oleh Dekranasda dalam memberdayakan pengrajin di Gmpung Ulee Madon di Putroena Souvenir.

Tabel Penelitian Kuisoner pengrajin di Putroena Souvenir di Ulee Madon:

No	Pertanyaan dan Jawaban	Jawaban Responden Dari Kuisoner					
		A	B	C	D	Jawaban tertinggi	%
1.	<p>Bagaimana keberadaan Program Dekranasda dalam pelaksanaan kegiatan pelatihan pembuatan Tas Motif Aceh Gampong Ule Madon?</p> <p>a. Sangat membantu</p> <p>b. Membantu</p> <p>c. Belum begitu membantu</p> <p>d. Tidak Membantu</p>	38	24	7	-	38	58,46%

2.	Apakah Pelatihan Pembuatan Tas Motif Aceh Gampong Ule Madon berjalan dengan Lancar ? a. Lancar b. Belum Lancar c. Biasa Saja d.	15	15	34	1	34	52,3%
3	Bagaimana tanggapan masyarakat dengan adanya keberadaan Program Dekranasda dalam membantu perekonomian masyarakat Ule Madon ? a. Sangat antusias b. Menyambut dengan baik c. Biasa saja d.	19	25	18	3	25	38,46%
4.	Apakah program Visi Misi Dekranasda terlaksanakan dengan baik ? a. Sangat baik b. Baik c. Kurang baik d.	10	17	22	16	22	33,84%
5.	Bagaimana perubahan dengan adanya program tersebut ada dampak yang baik atau tidak yang Anda rasakan setelah menjadi anggota warga belajar pelatihan pembuatan Tas Motif Aceh Gampong Ule Madon, untuk diri sendiri maupun keluarga Anda ? a. Ada banyak perubahan b. Ada c. Belum terlalu banyak perubahan d. Tidak ada perubahan	13	32	9	10	32	49,23%
6.	Menurut anda, apakah pengadaan pelatihan pembuatan Tas Motif Aceh Gampong Ule Madon baik dalam membantu mensejahterakan kehidupan anda ? a. Sangat membantu b. Dapat membantu c. Belum membantu d.	28	25	8	4	28	43,07%

7.	Jika anda sudah menikah, bagaimana tanggapan suami anda untuk mengikuti pelatihan pembuatan Tas Motif Aceh Gampong Ule Madon ? a. Sangat mendukung dan juga membantu b. Mendukung, tapi tidak membantu c. Mendukung d. Biasa saja	16	21	22	6	22	33,84%
8.	Apakah program Dekranasda tersebut berpengaruh baik bagi masyarakat di Gampong Ule Madon ? a. Sangat berpengaruh b. Berpengaruh baik c. Belum berpengaruh d.	24	23	10	8	24	36,92%
9.	Bagaimanakah ketersediaan sarana dan prasarana di Gampong Ule Madon ? a. Sangat memadai b. Memadai c. Kurang memadai/sering kekurangan d.	4	44	18	-	44	67,69%
10.	Bagaimana pemerintah dalam melakukan sosialisasi di Ule Madon ? a. Sangat antusias b. Baik c. Tidak begitu baik d.	7	18	10	30	30	46,15%
11.	Anda selama ini merasa puas dengan program yang diberikan dekranasda ? a. Sangat puas b. Baik c. Tidak begitu baik d.	5	18	32	10	32	49,23%
12.	Apakah penjualan hasil dari kerajinan ada peningkatan ? a. Selalu ada peningkatan b. Ada c. Terkadang d.	9	29	19	8	29	44,61%

13.	Apakah Dekranasda membantu penjualan hasil kerajinan tersebut ?						
	a. Selalu membantu	11	38	8	8	38	58,46%
	b. Membantu						
	c. Belum membantu						
	d. Sekali-kali						

Jadi, Penulis dapat menganalisa berdasarkan sumber data hasil wawancara, bahwa kondisi yang diberdayakan melalui program tersebut dengan adanya keberadaan kegiatan dari program tersebut sudah sangat membantu masyarakat di gampong Ulee Madon pengrajin Tas Motif Aceh sudah mampu memberdayakan mereka dalam menuju perubahan yang lebih meningkatkan kualitas kehidupan mereka sehari-hari, tingkat kesejahteraan, pencapaian kesejahteraan tidak hanya berpatokan pada perempuan dalam memenuhi kebutuhan rumah tangganya akan tetapi juga pemenuhan kebutuhan pendidikan anak-anaknya, Dekranasda dalam melakukan programnya dari promosi dan pemasaran, ada peningkatan hasil produksi, Dekranasda memberikan promosi baik ke lembaga daerah atau nasional sesuai kemana adanya seminar-seminar atau *expo-expo* dan beberapa acara lainnya, dari promosi tersebut ada peningkatan produksi kepada pengrajin, adapun Dekranasda dengan mendatangkan pihak yang berkeinginan dalam hasil kerajinan yang menyukai hasil kerajinan daerah.

Namun, dalam hal lainnya program Dekranasda belum berjalan secara menyeluruh belum berjalan sempurna dari programnya, pemberdayaan yang dilakukan pemerintah atau pengurus Dekranasda tidak begitu baik dalam hal sosialisasi, kerutinan pelatihan, penyuluhan dalam memberikan kontribusi kepada masyarakat belum secara maksimal adanya, *Kontribusi* yang dijalankan dalam memberikan daya kepada pengrajin tentu harus di tingkatkan oleh pemerintah

atau pengurus Dekranasda dari program tersebut di jalankan sesuai target yang di buat tentu akan ada hasil yang lebih baik, di karenakan dari hasil olahan kerajinan pengrajin tersebut sangat besar peluang dalam membangun ekonomi, sangat besar peluang dalam menggerakkan ekonomi Daerah bahkan ekonomi Nasional masyarakat.

C. Tinjauan Ekonomi Islam Pada program Dekranasda di Gampong Ulee Madon Tas Motif Aceh Putroena Souvenir

Ekonomi Islam di definisikan sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, meneliti, akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara yang Islami, yang dimaksud dengan cara Islami adalah cara yang didasarkan kepada *Al-Qur'an*, *Sunnah* Islam diantara agama-agama lain yang ada di dunia. Islam adalah satu-satunya agama yang menjunjung tinggi nilai tolong menolong, keadilan, dan sebagainya.

Pada umumnya masyarakat ekonomi menengah kebawah banyak melakukan usaha-usaha dibidang perdangan atau kerajinan, karena usaha tersebut lebih mudah ditekuni tidak harus memiliki keahlian khusus, salah satu kendala masyarakat dalam melakukan suatu usaha yaitu sulit memperoleh pengetahuan yang memberikan ilmu dasar. Dengan adanya Kerajinan Tas Motif Aceh Putroena Souvenir di Ulee Madon di harapkan dapat membantu keadilan masyarakat Gampong Ulee Madon dan Gampong sekitarnya yang dapat memberikan mereka cara menjahit atau kerajinan Tas Motif Aceh. Adapun dengan kerjasama Dekranasda dengan Tas Motif Aceh Putroena Souvenir di Ulee Madon juga

memberikan peluang untuk dapat menambah ekonomi masyarakat dari hasil kerajinan produk para pengrajin, di mana Dekranasda membantu masyarakat yang di berdayakan sesuai program yang di jalankan oleh Dekranasda.

Secara khusus, konsep pemberdayaan dalam Islam dalam sistem ekonomi syariah bersumber dari *Al-qur'an* dan *Sunnah*, yang menjadi dasar dari pandangan hidup Islam. Selalu dipegang dalam menghadapi perkembangan zaman dan perubahan masyarakat. semua permasalahan yang berkembang, termasuk ekonomi harus tunduk kepada prinsip Islam.

Dalam *Al-qur'an* Allah juga menjelaskan tentang pemberdayaan yaitu:

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعِيشَةً قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿١٠﴾

Artinya: " Dan sungguh, Kami telah Menempatkan kamu dimuka bumi dan di sana Kami Sediakan (sumber) penghidupan untuk-mu. (Tetapi) sedikit sekali kamu bersyukur." (Q.S *Al-A'raf*: 10).

Allah SWT berfirman guna mengingatkan hambanya akan anugerah yang telah diberikan kepada mereka yaitu Allah menjadikan bumi dengan segala kebaikan yang terdapat didalamnya. Usaha dan manfaat yang menjadi sarana penghidupan mereka, walaupun anugerah Allah demikian banyak akan tetapi sedikit sekali yang bersyukur akan Nikmat yang Allah berikan. Allah menciptakan manusia dimuka bumi ini sekaligus menciptakan segala sesuatu sarana yang memenuhi kebutuhan bagi kehidupan manusia, sumber bagi penghidupan manusia Allah ciptakan segala sumber daya alam, air dan sebagainya bukan untuk dipergunakan secara semena-mena oleh pihak yang tak bertanggung jawab.

Program pemberdayaan ekonomi memang dianjurkan dalam ajaran Islam, karena tujuan dari ekonomi Islam adalah menciptakan kehidupan manusia yang aman dan sejahtera, ekonomi Islam adalah bagian dari tatanan Islam yang meletakkan ekonomi pada posisi tengah dan keseimbangan yang adil artinya di bidang ekonomi keseimbangan diterapkan dalam sisi imbang antara modal dan usaha, antara produksi dan konsumsi, antara produsen dan konsumen serta antara golongan dan masyarakat.

Penerapan nilai dan prinsip ekonomi syariah pada pola pemberdayaan oleh Dekranasda Kabupaten Aceh Utara di Gampong Ulee Madon dapat di amati pada pola pemberdayaan melalui program yang di laksanakan oleh Dekranasda menjalankan pola pemberdayaan berdasarkan prinsip dan aturan dalam Ekonomi Islam:

1. Prinsip Tauhid

Tauhid artinya keimanan kepada Allah SWT, dalam segala aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh setiap muslim sebagai sebuah perintah ibadah. Aktivitas ekonomi yang dilakukan tidak hanya mengutamakan nilai ekonomis, namun juga di iringi dengan ketaatan atas perintah Allah sehingga apa yang di lakukan harus penuh tanggung jawab. Dalam program pemberdayaan masyarakat atau pemberdayaan perempuan Ulee Madon sudah menjadi kewajiban para masyarakat dan setiap muslim untuk selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya. Prinsip Tauhid dan persaudaraan, artinya segala aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh setiap muslim akan terjaga karena ia merasa bahwa Allah SWT selalu melihatnya. Sementara konsep persaudaraan atau ukhuwah

islamiyah memberikan makna kerja sama sesama muslim dalam aktivitas ekonomi.

Disini pengurus Dekranasda memberikan pemberdayaan kerjasama tanpa meminta balas jasa, hanya mengharapkan kepada pengrajin hidupnya terberdaya, semakin mandiri dalam nilai ekonomi, pengembangan kreatifitas pengrajin, merupakan tanggung jawab Dekranasda saling bersinergi dan terus berupaya membina, melestarikan dan mengembangkan produk kerajinan tradisional daerah peninggalan *endatu* agar tetap lestari dan berkembang dengan baik.

2. Prinsip Produksi dalam Islam

Prinsip bekerja dari produktifitas dalam ekonomi bahwa setiap individu dituntut bekerja berusaha untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka, dengan semaksimal mungkin agar dapat memunuhi tingkat produktifitas yang tinggi sesuai dengan batasan-batasan dalam Islam. Dalam program pemberdayaan ini tentu para anggota berusaha bekerja merubah diri mereka menjadi pengrajin yang lebih baik dari sebelumnya dan berpengetahuan luas dalam bidang tersebut.

Adapun dapat berproduksi dengan semaksimal mungkin dalam merubah kehidupan sehari-hari dalam memenuhi kehidupan sehari-hari mereka. Dengan adanya pemberdayaan yang dilakukan Program Dekranasda ini dapat meningkatkan produksi dengan apa yang sudah para pengrajin lakukan dan berdampak positif pada kesejahteraan pengrajin Tas motif Aceh dan dapat meningkatkan Ekonomi mereka.

3. Tolong menolong (*Ta'awun*)

Dimana dengan adanya program dari Dekranasda yang dijalankan sesuai, salah satu tujuan Dekranasda Kabupaten Aceh utara dalam pelaksanaan pemberdayaan ekonomi perempuan melalui pelatihan, penyuluhan, promosi, adalah untuk membantu dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat perempuan dalam meringankan beban keluarga dengan aturan-aturan serta mekanisme yang harus di patuhi bagi masyarakat.

Saling tolong menolong, antara lembaga pemerintah dengan pekerja. dalam Al-qur'an Allah juga menjelaskan tentang Saling tolong menolong yaitu:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا مُجْلُوا شَعَبِ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا أَهْدَى وَلَا الْقَلْبِدَ وَلَا
ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا
تَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا
عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

الْعِقَابِ ﴿٢٠١﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah[389], dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram[390], jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya[391], dan binatang-binatang qalaa-id[392], dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya[393] dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya". (Al-Maidah: 2).

Berdasarkan Firman Allah SWT di atas dapat kita simpulkan bahwa yang menjadi dasar umum membolehkan pelaksanaan pemberdayaan ekonomi perempuan dalam ekonomi Islam oleh Dekranasda pemerintah Kabupaten Aceh Utara melalui bantuan program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri adalah dasar tolong menolong terhadap orang-orang yang membutuhkan pertolongan dari orang dalam hal ini adalah pemerintah yang membantu atau menolong orang-orang lemah.

Dalam bekerja berusaha Islam mengajarkan kaum muslimin untuk saling tolong menolong atau *ta'awun* diantara mereka dalam segala kondisi maupun keadaan dan saling bekerja sama satu sama lain dan tidak hanya memikirkan untuk keuntungan berbisnis saja. Karena perbuatan saling tolong-menolong tersebut merupakan prinsip dasar dalam bekerjasama. Pemberdayaan para pengrajin saling membantu bekerja sama tolong menolong dalam memperbaiki taraf hidup pengrajin. Dengan adanya prinsip ekonomi yaitu *ta'awun* atau saling tolong menolong maka masyarakat akan semakin harmonis dan sejahtera.

Adapun melalui bekerjalah manusia dapat memenuhi kebutuhannya, didunia modern sekarang ini perlu adanya keahlian yang dimiliki, salah satu cara yang tepat adalah melakukan penyuluhan-penyuluhan dalam meningkatkan kemampuan daya saing. Tujuan dari program ini adalah untuk membantu pemberdayaan perempuan dalam memperoleh informasi, pengetahuan, keterampilan yang berguna bagi kehidupannya atau dengan kata lain membantu pengrajin yang lemah ekonomi untuk memiliki kekuatan kemampuan kemandirian dalam memenuhi kebutuhan kehidupan dasarnya sehingga mereka

tersejahterakan. Pemberdayaan ekonomi, pemberdayaan perempuan melalui kerajinan agar mampu meningkatkan kapasitas produksinya.

4. Kesejahteraan Sosial dalam islam

Dalam Islam, kesejahteraan sosial salah satu yang di prioritaskan, di mana untuk memenuhi kebutuhan, Dekranasda membantu pengrajin di Ulee Madon dengan tidak langsung, yaitu dengan cara memberikan ilmu kepada pengrajin, sebelumnya banyak masyarakat belum bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari atau mencukupi kebutuhannya. Dalam Al-qur'an Allah juga menjelaskan tentang Kesejahteraan Sosial dalam Islam yaitu:

فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ ۗ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَءَامَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ ۗ

Artinya: "Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan (pemilik) rumah ini (ka'bah), yang telah Memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan Mengamankan mereka dari rasa ketakutan". (Q.S Quraisy: 3-4)

Berdasarkan Firman Allah SWT di atas dapat kita simpulkan bahwa yang menjadi acuan untuk kesejahteraan sosial dalam Islam adalah pihak pemerintah atau pengurus Dekranasda berkewajiban dalam mewujudkan kesejahteraan sosial melalui pemberayaan ini adalah salah satu tugas yang harus di jalankan, dengan berkembangnya Tas Motif Aceh, kebutuhan masyarakat semakin tercukupi. Masyarakat bebas memproduksi dengan daya kreasi dan daya ciptanya sesuai permintaan pasar, dengan demikian setiap produksi yang dihasilkan dapat meningkatkan baik kualitas maupun kuantitas, jelaslah bahwa dari kerajinan Tas Motif Aceh ini dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya baik dari tempat tinggal, makanan, pakaian, baik rasa

aman, nyaman, tentram dapat dirasakan oleh masyarakat khususnya di Ulee Madon para pengrajin di Putroena Souvenir.

5. Keadilan Distribusi

Pemberdayaan yang dilakukan Program Dekranasda terhadap Gampong Ulee Madon hanya melanjutkan saja, yaitu Gampong tersebut memang sudah memiliki khasnya sendiri yaitu Tas Motif Aceh dari generasi sebelumnya, peran pemerintah di sini yaitu memberikan kesempatan seluas-luasnya, menggalakkan berbagai kegiatan lagi, mengoptimalkan sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki. Ciri ekonomi Islami adalah yang mendorong umat untuk berinfak mengeluarkan harta di jalan yang baik, dan mengharamkan penimbunan dengan memperluas jaringan usaha produktif. Keadilan distribusi adalah keadilan yang membagi kesejahteraan umum kepada setiap masyarakat di Gampong Ulee Madon sesuai dengan jasa dan kebutuhan masing-masing secara *universal*.

Segala aturan yang Allah berikan dalam nilai-nilai Islam mengarah pada tercapainya kebaikan, kesejahteraan, keutamaan, serta menghapuskan kejahatan, kesengsaraan, kriminal, dan kerugian tujuannya adalah membantu manusia mencapai kemenangan dunia dan akhirat.

Berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi di atas dapat dilihat bahwa kelima prinsip ekonomi di atas telah sesuai dengan apa yang dilakukan di Ulee Madon pada Putroena Souvenir, dalam pelaksanaan program pemberdayaan yang telah dilakukan bahwa masyarakat tidak hanya mementingkan urusan dunia saja tetapi mereka juga berprinsip kepada aturan-aturan Islam atau batasan-batasan dalam

berusaha bekerja mencari rezeki untuk dapat memnuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Berdasarkan sumber data hasil wawancara, dapat di simpulkan bahwa Pengurus Dekranandsa sudah melakukan Program tersebut sesuai dengan ajaran Islam, di mana sudah mampu meningkatkan hasil produksi kerajinan pengrajin untuk di distribusikan, menjalankan program dengan hasil yang dapat meningkatkan kesejahteraan kepada pemberdayaan perempuan di Ulee Madon.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemberdayaan perempuan yang dilakukan oleh Dekranasda terhadap program yang dijalankannya sudah ada hasil walaupun belum maksimal dekranasda melakukan pemberdayaannya melalui beberapa bidang yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Di Ulee Madon terkhusus di Putroena Souvenir.
2. Dekranasda menjalankan beberapa kegiatan mulai dari pelatihan, penyuluhan, infromasi, promosian atau pemasaran. Namun upaya tersebut belum sepenuhnya berjalan dengan baik, sehingga pemberdayaan perempuan belum semuanya merasakan dengan maksimal dari programnya.
3. Tinjauan ekonomi Islam terhadap pola pemberdayaan oleh sudah sesuai dengan pandangan Islam, karena melihat kriteria yang di lakukan pemberdayaan, dan juga Dekranasda sudah menjalankan programnya untuk memberdayakan sehingga kesejateraan yang didapatkan sudah ada perubahan, sudah ada peningkatan taraf ekonomi, walaupun belum maksimal sepenuhnya dalam menjalankan program secara rutin.

B. Saran

Adapun saran yang ingin penulis sampaikan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi penelitian selanjutnya alangkah lebih baik jika lebih fokus untuk meneliti partisipasi pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat. Hal ini dikarenakan penggerak kedua yang berpengaruh untuk menggerakkan lajunya perekonomian untuk masyarakat adalah bagaimana pemerintah ikut berpartisipasi secara bertahap dan rutin dalam kepedulian mensejahterakan masyarakat.
2. Bagi pengurus Dekranasda untuk lebih melakukan pemberdayaan kepada perempuan lebih teratur, lebih konsisten dalam menjalankan kebijakan programnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahan*, Cet x. Bandung: Diponegoro, 2013.
- Aisyah, Siti, "Peran Perempuan Dalam Masyarakat Di Aceh (Studi Kasus Terhadap Pandangan Aktifis Pusat Studi Wanita UIN Arraniry Banda Aceh)", *Skripsi*, Banda Aceh: UIN Araniry. 2018.
- Faisal, Sanapiah, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.
- Andayani, Aal, "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata dan Implikasinya Terhadap ketahanan Sosial Budaya Wilayah (Studi di Desa Wisata Penglipuran Bali)", *Jurnal Ketahanan Nasional*, Vol. 23, No.1, 27 April 2017.
- Fatimah, Winar Nur Aisyah, "Karanganyar Hijau Sebagai Program Pemberdayaan Masyarakat di Desa Karanganyar", *Jurnal Care Jurnal Resolusi Konflik, Csr, Dan Pemberdayaan*, Vol. 1 (1), Juni 2016.
- Fitra, Aidil, "Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Usaha Rumahan (Home Industri) Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Di Kecamatan Kampar Timur", dalam *Skripsi*, Riau: UIN Sultan Syarif Kasim, 2013.
- Halim, Suhartini A, dkk, *Model-Model Pemberdayaan Masyarakat*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005.
- Herawati, Merla Liana, "Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Kerajinan Tempurung Kelapa: Studi Kasus Di Dusun Santan, Guwosari, Pajangan, Bantul", *Skripsi*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014.
- Herlambang, Tedy, dkk, *Ekonomi Makro Teori Analisis Dan Kebijakan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002.
- Hutomo, Yardi Yatmo, "Pemberdayaan Masyarakat Dalam Bidang Ekonomi: Tinjauan Teoritik Dan Implementasi", *Jurnal* No. 20, Juni-Juli 2000.
- Iskandar, Dwi, "Pembedayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Kerajinan Kipas Bambu Di Dusun Jipangan, Bangujiwo, Kasihan, Bantul", (*Skripsi*, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2016.
- Karsidi, Ravik, "Pemberdayaan Masyarakat Untuk Usaha Kecil Dan Mikro (Pengalaman Empiris di Wilayah Surakarta Jawa Tengah)", *Jurnal Penyuluhan*, Vol. 3 No. 2 November 2007.

- Maulana, Rian, "Konsep Distribusi Menurut Muhammad Baqir As-Shadr, Al-Iqtishad", *Jurnal*, Vol. II, No. 2 Juli 2010.
- Muhammad, *Ekonomi Islam*, Malang: Empat Dua, 2009.
- Narbuko, Cholid, Acyadi, Abu, *Metodologi Penelitian*, Jakarta Bumi Akara: 2001.
- Nastiti, NR, Bab II Kajian Teori, 2014.
- Pradja, Juhaya S, *Ekonomi Syariah*, Bandung: Pustaka, 2015.
- Prijono, Onny S. dan Pranarka, A.M.W, *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan, dan Implementasi*, Jakarta: CSIS, 1996.
- Qanun Provinsi Aceh Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Pemberdayaan Dan Perlindungan Perempuan.
- Rahardjo, M. Dawam, *Islam dan Transformasi Sosial, Ekonomi, Lembaga Studi Agama dan Filsafat*, Yogyakarta: 1999.
- Rahmawati, Anita, "Distribusi Dalam Ekonomi Islam Upaya Pemerataan Kesejahteraan Melalui Keadilan Distributif", *Jurnal*, Vol. 1, No. 1 Juni 2013.
- Restianti, G, "Bab III Prinsip ekonomi dalam Islam", 2015.
- Salim, Muhammad Firliadi Noor, "Distribusi Dalam Ekonomi Islam", 2017.
- Saparwadi, "Strategi Pemberdayaan Masyarakat Oleh Pengurus Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (PKK): Studi di Kampung Demangan RW 05, Kelurahan Demangan, Kecamatan Gondokusuman", Yogyakarta, *Skripsi Thesis*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.
- Sufi, Rusdi, dkk, *Aceh Tanah Rencong*, Cet I, Yogyakarta: Multi Media Press, 2008.
- Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2006.
- Suharto, Edi, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Bandung: Refika Aditama, 2006.
- Suparmoko, Irawan, M. *Ekonomika Pembangunan*, Edisi Keenam, Cet. II, Yogyakarta: Bpfe, 2008.

Surbakti, Mhd. Handika, "Konsep Kesejahteraan Sosial Dalam Islam Berdasarkan Al-Qur'an", *Jurnal* 2017.

Syarbani, Amirullah, *Islam Agama Ramah Perempuan (Memahami Tafsir Agama Dengan Perspektif Keadilan Gender)*, Jakarta: Prima Pustaka, 2013.

Umar, Muhammad, *Peradaban Aceh Kilasan Sejarah Aceh Dan Adat*, Banda Aceh: Yayasan Busafat, 2006.

Wikipedia, Dewan Kerajinan Nasional,
http://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Kerajinan_Nasional.

Zubaedi, *Wacana Pembangunan Alternatif: Ragam Perspektif Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2007.

Zuraina, Putri, "Tinjauan Ekonomi Syariah Tentang Pelaksanaan penyaluran Bantuan Modal Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) (Studi Kasus di Desa Keude Matang Panyang Kec. Tanah Pasir)". *Skripsi*, Lhokseumawe: IAIN Lhokseumawe, 2017.